

MEKANISME PERHITUNGAN PPH BADAN PADA UD.
MITRA ABADI SEJAHTERA DI SURABAYA

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Prasyarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

GIOVANI ANGGASTA

0822637

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA

2012

MEKANISME PERHITUNGAN PPH BADAN PADA UD.
MITRA ABADI SEJAHTERA DI SURABAYA

SKRIPSI



Oleh:

GIOVANI ANGGASTA

0822637

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA

2012

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Giovani Anggasta dengan NPM 0822637

Telah diuji pada Senin, 24 September 2012 dan dinyatakan LULUS oleh:

Ketua Tim Penguji



(Dra. M. Yovita R. Pandin, **M.M.**)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Dra. Maria Widyastuti, **M.M.**)

Ketua Jurusan,



(Dra. Jeanne Asteria Wawolangi Msi. **Ak**)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Mekanisme Perhitungan PPh Badan Pada UD. Mitra Abadi Sejahtera di Surabaya

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan

Tim penguji skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Dharma Cendika

Jurusan Akuntansi

Pada Hari Senin, Tanggal 24 September 2012

Disusun oleh:

Nama : Giovani Anggasta

NPM : 0822637

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tim Penguji :

1. Ora. M. Yovita R. Pandin, M.M. (Ketua)

2. Drs. Misrin Harijadi, M.Ak (Anggota)

3. Drs. Ec. Soejono Rono, M.M (Anggota)

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Giovanni Anggasta
NPM : 0822637
Fakultas : Ekonormi
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Mekanisme Perhitungan PPh Badan Pada UD. Mitra
Abadi Sejahtera Di Surabaya

Pembimbing I,
Tanggal : ... 09, 9939



(Drs. Misrin Harijadi, M.Ak)

Mengetahui : Ketua
Program Studi
Tanggal : ... 03. 3g8t. v?



(Ora. Jeanne Asteria Wawolangi Msi. Ak)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Giovani Anggasta

NPM : 0822637

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Tempat / Tgl Lahir : Surabaya, 09 Maret 1989

Alamat : Perumahan Town House BIO, Taman Sidoarjo

Judul Skripsi :

Mekanisme Perhitungan PPh Badan Pada UD. Mitra Abadi Sejahtera Di Surabaya"

- I. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar karya ilmiah sendiri bukan plagiat dan atau karya orang lain.
2. Memperbolehkan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika untuk mempublikasikan seluruh atau sebagian dari isi skripsi ini ke media publikasi. Dengan mencantumkan nama peneliti serta dosen pembimbing.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ada permasalahan terbadap karya ilmiah ini, maka saya siap bertanggungjawab sesuai dengan hukum yang berlaku.

Surabaya, 13 Agustus 2012

Yang membuat pernyataan,


(Giovani Anggasta)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan rahmat karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul: **"Mekanisme Perhitungan PPh Badan Pada UD. Mitra Abadi Sejahtera di Surabaya"**. Penyusunan skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana ekonomi (S.E) program Strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis memiliki banyak kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Yovita R. Pandin, M.M., selaku Rektor Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
2. Ibu Dra. Maria Widyastuti, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya.
3. Ibu Dra. Jeanne Asteria Wawolangi Msi. Ak, selaku Kepala Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya..
4. Bapak Drs. Misrin Harijadi, M.Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya atas pengetahuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Bapak Michael, Franklin, dan Herman selaku pemilik UD. Mitra Abadi Sejahtera yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian serta membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
7. Papa, Mama, Adik penulis Siska dan Lanny yang telah memberi doa, semangat dan dukungan baik moral maupun materiil bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ko Mike (Oh Hwie Hong) yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan penuh bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta teman-teman seperjuangan penulis: Ema, Sherly Oei, Tannia, Shelly, Ardi, dan teman lainnya beserta seluruh pihak yang penulis tidak mampu menyebutkan, satu per satu yang memberikan dukungan serta semangat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini agar menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Bentuk Badan Usaha di Indonesia.....	5
2.1.2 Akuntansi Badan Usaha Perseorangan.....	9
2.1.2.1 Pengertian Akuntansi.....	9
2.1.2.2 Kerangka Kerja Konseptual	10
2.1.2.3 Siklus Akuntansi	16
2.1.3 Penentuan Saldo Awal	20
2.1.4 Subyek Pajak Penghasilan.....	23



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.1.5	Obyek dan Bukan Obyek Pajak Penghasilan	24
2.1.6	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	26
2.1.7	Pajak Penghasilan Badan	26
2.1.7.1	Pembukuan dan Pencatatan	26
2.1.7.2	Biaya Pengurang	27
2.1.7.3	Penyusutan dan Amortisasi	28
2.1.7.4	Tarif Pajak Penghasilan	39
2.1.7.5	Koreksi Fiskal	41
2.1.7.6	Surat Pemberitahuan	42
2.2	Hasil Penelitian Terdahulu	43
2.2.1	Jurnal Penelitian	45
2.3	Rerangka Pemikiran	45
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	47
3.1	Obyek Penelitian atau Gambaran	47
3.2	Pendekatan Penelitian dan Sumber Data	47
3.3	Teknik Pengambilan Sampel	47
3.4	Teknik Pengumpulan Data	48
3.5	Satuan Kajian	48
3.6	Teknik Analisis Data	48
BAB IV	HASIL PENELITIAN	50
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	50
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian	52
4.3	Pembahasan dan Analisa Data	55

BAB V	PENUTUP	74
5.1	Kesimpulan	74
5.2	Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tarif Penyusutan	29
Tabel 2.2	Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Dalam Kelompok 1	33
Tabel 2.3	Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Dalam Kelompok 2 ...	34
Tabel 2.4	Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Dalam Kelompok 3, ...	36
Tabel 2.5	Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Dalam Kelompok 4 ...	37
Tabel 4.1	Contoh Buku Kas Tahun 2010	53
Tabel 4.2	Rekap Buku Kas Tahun 2010	53
Tabel 4.3	Daftar Aktiva Tetap	54
Tabel 4.4	Contoh Buku Bank	55
Tabel 4.5	Buku Besar Bank	58
Tabel 4.6	Buku Besar Kas	59
Tabel 4.7	Kertas Kerja	60
Tabel 4.8	Daftar Aktiva Tetap Perusahaan	65
Tabel 4.9	Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap	65
Tabel 4.10	Laporan Laba Rugi Komersial	69
Tabel 4.11	Laporan Perubahan Ekuitas	70
Tabel 4.12	Neraca	71
Tabel 4.13	Laporan Laba Rugi Berdasarkan Perpajakan	72
Tabel 4.14	Perhitungan PPh Badan	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Siklus Akuntansi	17
Gambar 2.2	Rerangka Pemikiran	46
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	51

ABSTRACT

With the diversion of tax laws, makes many people who do not understand about tax obligations, primarily an individual or an entity that does not have tax consultant, which have not an update knowledge and mechanism on taxation in Indonesia.

With these problem faced, there are the solutions given in this paper is about mechanism of calculating corporate income tax at UD. Mitra Abadi Sejahtera.

This research have purpose to describe the mechanism of calculating corporate income tax at UD. Mitra Abadi Sejahtera. To achieve this goal the data analysis is done by collecting the cash book, bank book, a warehouse stock, and purchase orders. From this data we will be creating financial statements which became the basis for tax calculation.

The results showed that from financial statements that have been made can be known : profit earned, assets and total tax payable.

The conclusion of the research is the company has not been doing the accounting in accordance with generally accepted accounting principles. The company has never made financial statements so the owner never knew its earnings and assets value precisely. The company has been using a calculation norm to calculate its tax obligations, the value of taxes paid does not fit with the fact because it uses interpretation of the owner. A recommendation from this results are the company should do the bookkeeping in accordance with generally accepted accounting principles and financial reporting so the owner can determine its earnings and it assets value definitely and firm's bookkeeping should be used to calculate the tax obligations so the value of the tax paid is in accordance with the reality.

Keywords: Mechanism, Calculation, Income Tax for agency



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Sensus pajak yang dilakukan pemerintah pada tahun 2011 lalu adalah suatu indikasi bahwa pajak saat ini sangatlah penting baik bagi negara maupun masyarakat. Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar, sedangkan bagi orang pribadi maupun badan pajak sangatlah penting untuk diketahui agar setiap orang pribadi maupun badan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Adanya peraturan perpajakan yang beragam, membuat banyak pihak tidak memahami kewajiban perpajakannya terutama orang pribadi maupun badan yang tidak memiliki konsultan pajak, yang tidak *update* tentang perpajakan, dan yang tidak memiliki pengetahuan tentang mekanisme pajak yang ada di Indonesia.

Di Indonesia dikenal beberapa macam bentuk badan usaha antara lain yayasan (bentuk badan usaha yang tidak mencari keuntungan dan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, serta kemanusiaan), koperasi (badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan), perseroan terbatas (badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham), persekutuan komanditer (suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya).

Objek penelitian dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebuah badan usaha yang berbentuk perusahaan perseorangan (UD). Perusahaan perseorangan (UD) adalah suatu perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang saja.



Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Perusahaan perseorangan merupakan suatu usaha yang telah lama ada, sederhana dan dapat diorganisir secara informal, pengaturannya sangat minim serta resiko yang dihadapi tidak hanya terbatas pada kekayaan perusahaan, tetapi mencakup keseluruhan kekayaan pribadinya. Dari sisi pajaknya, perusahaan perseorangan (UD) tidak wajib melakukan pembukuan selama belum mencapai omzet lebih dari Rp. 4.800.000.000,- setahun. Perusahaan perseorangan (UD) ini akan dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 17 badan.

UD. Mitra Abadi Sejahtera bergerak di bidang distributor produk-produk curah untuk rumah tangga seperti detergen cair, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, sabun mandi cair, karbol, pewangi laundry, pelicin pakaian, dan lain-lain yang berlokasi di Surabaya. UD. Mitra Abadi Sejahtera tidak pernah membuat laporan keuangan. Perusahaan tersebut selama ini hanya menggunakan pencatatan yang meliputi pencatatan arus kas masuk dan keluar, penjualan kredit dan pelunasannya, selain itu perusahaan tersebut juga tidak pernah melakukan penyusutan atas aktiva yang dimilikinya. Karena tidak pernah membuat laporan keuangan maka pemilik perusahaan tersebut tidak pernah mengetahui secara pasti laba atau rugi yang diperolehnya.

Dikarenakan tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan maka kewajiban perpajakannya masih belum dilakukan dengan benar. Perusahaan tersebut saat ini terdaftar dalam badan usaha berbentuk perseorangan dengan mengikuti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) salah satu pemilik. Perusahaan tersebut selama ini melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan untuk wajib pajak orang pribadi, dikarenakan pemilik tidak ingin susah. sementara badan usaha ini dimiliki oleh tiga orang yaitu Tuan Franklin, Tuan Michael, dan

Tuan Herman. Perlakuan untuk pembagian keuntungan adalah 75% (enam puluh persen) dari laba bersih dibagikan pada ketiga pemilik dengan proporsi yang sama rata sedangkan sisanya yaitu 25% (dua puluh persen) dimasukkan ke dalam kas dan masing-masing pemilik menyetorkan modal dalam jumlah yang sama.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

Bagaimanakah mekanisme perhitungan PPh badan pada UD. Mitra Abadi Sejahtera.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

Untuk mengetahui mekanisme perhitungan PPh badan pada UD. Mitra Abadi Sejahtera.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat bagi penulis

Memperluas wawasan dan menambah pengetahuan serta pengalaman mengenai mekanisme perhitungan PPh badan pada UD. Mitra Abadi Sejahtera.



b. Manfaat bagi perusahaan

Memberikan masukan pada perusahaan bagaimana mekanisme perhitungan PPh badan pada UD. Mitra Abadi Sejahtera.

c. Manfaat bagi pembaca

Memberikan pengetahuan mengenai mekanisme perhitungan PPh badan pada perusahaan yang berbentuk perseorangan, selain itu dapat juga menjadi referensi pembaca guna penelitian lebih lanjut.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak memperluas permasalahan, yaitu khusus pada pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari tiga jenis yaitu laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Dari segi perpajakan, penelitian yang dilakukan terbatas pada perhitungan PPh badan dari UD. Mitra Abadi Sejahtera dalam bentuk badan usaha perseorangan. Sedangkan data-data yang digunakan terbatas pada tahun 2010.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bentuk Badan Usaha di Indonesia

“Badan usaha adalah lembaga atau organisasi yang melakukan kegiatan yang menggerakkan tenaga, pikiran, dan peralatan untuk mencapai sesuatu” (Mursyidi 2010:4). “Bentuk perusahaan secara garis besar dapat diklarifikasikan berdasarkan jumlah pemiliknya, status pemiliknya, dan dari bentuk badan hukumnya” (Simangunsong dan Sari, 2004:27). Simangunsong dan Sari (2004:27) menyatakan bahwa :

Dilihat dari jumlah pemilik, terdiri dari :

- a. Perusahaan perorangan yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau seorang pengusaha.
- b. Perusahaan persekutuan yaitu suatu perusahaan persekutuan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan.

Dilihat dari status pemilik, terdiri dari :

- a. Perusahaan Swasta merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha swasta.
- b. Perusahaan Negara merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Negara yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dilihat dari bentuk hukum, terdiri dari :

- a. Perusahaan Berbadan Hukum, selalu berupa persekutuan, contohnya adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.
- b. Perusahaan Bukan Badan Hukum, dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan.

Adapun yang dimaksud dengan bentuk badan hukum yaitu badan usaha yang mempunyai kekayaan tersendiri, terpisah dari harta kekayaan para pendirinya atau para pengurusnya. Para anggota ini tidak bertanggung jawab dengan harta kekayaan di luar saham yang dimilikinya. Yang menjadi fokus



dalam penulisan skripsi ini adalah badan-badan usaha yang tidak berbadan hukum yang ada di Indonesia, antara lain :

1. Perusahaan perseorangan

“Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki dan oleh 1 (satu) orang saja” (Sugiri dan Riyono, 2007:12). Pemilik perusahaan memperoleh seluruh laba sekaligus menanggung segala resikonya, resiko yang dihadapi tidak hanya terbatas pada kekayaan perusahaan, tetapi mencakup keseluruhan kekayaan pribadinya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, jenis serta jumlah produksi terbatas, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit dan alat produksi yang digunakan masih sederhana.

Perusahaan perseorangan memiliki ciri dan sifat antara lain adalah relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan, dimiliki oleh 1 (satu) orang, pengelolaannya lebih sederhana, modal yang diperlukan tidak terlalu besar, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi seluruh keuntungan dinikmati sendiri, jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup tergantung pada pemiliknya dan sewaktu-waktu dapat dipindahtangankan. Kelebihan dari perusahaan perseorangan adalah seluruh keuntungan perusahaan menjadi milik sendiri, mudah mendirikan karena tidak perlu berbadan hukum, pemilik bebas mengambil keputusan, sehingga keputusan tersebut bisa cepat dilaksanakan, sifat kerahasiaan perusahaan terjamin, biaya operasional perusahaan rendah, karena perusahaan tergolong sederhana, dan manajemen perusahaan fleksibel.

Selain memiliki kelebihan, perusahaan perseorangan juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangan antara lain adalah modal perusahaan tidak



terlalu besar, pemilik bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang terjadi, tidak ada pemisahan antara harta perusahaan dengan harta pribadi, pengelolaan dan kelangsungan perusahaan tergantung dari kemampuan pemilik.

2. Persekutuan

“Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, yang menjalankan usahanya dengan nama bersama untuk mencapai tujuan bersama” (Sugiri dan Riyono, 2007:12). Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah persekutuan firma (Fa) dan persekutuan komanditer (CV). Untuk mendirikan badan usaha persekutuan dibutuhkan ijin khusus pada instansi pemerintah yang terkait.

Menurut Wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha, tanggal 07 April 2012, jam 19.05), “Firma (Fa) adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana tiap- tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan”. Semua anggota firma bertanggung jawab penuh baik secara individu maupun bersama-sama terhadap hutang perusahaan.

Perusahaan persekutuan dengan firma memiliki ciri dan sifat antara lain adalah apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi hutang tersebut dengan harta pribadinya, setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin, seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya, keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup, dan seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma, tidak ada keharusan membuat akte pendirian.

Sedangkan kelebihan dari perusahaan persekutuan firma adalah kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara





sesama anggota, pendirian firma relatif lebih mudah karena tidak harus membuat akte pendirian, kebutuhan modal lebih terpenuhi, lebih mudah untuk memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan *financial* yang lebih besar daripada perusahaan perseorangan. Selain memiliki kelebihan, perusahaan persekutuan firma juga memiliki kekurangan, antara lain yaitu tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan, apabila salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama maka secara otomatis badan usaha firma menjadi bubar sehingga kelangsungan perusahaan tidak menentu, jika salah satu anggota membuat kerugian, maka kerugian tersebut juga ditanggung oleh anggota yang lain.

Menurut Wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha, tanggal 25 Februari 2012, jam 21:23), “Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan komanditer mengenal 2 istilah yaitu : sekutu aktif dan sekutu pasif..... “. Sekutu aktif atau sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu yang ikut aktif mengelola perusahaan. Sekutu ini bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta pribadinya (tidak terbatas) sedangkan sekutu pasif atau sekutu komanditer atau sekutu diam adalah sekutu yang tidak ikut mengelola perusahaan. Sekutu ini bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang di tanam di dalam persekutuan. Sekutu pasif ini hanya menanam modal saja.

Adapun ciri dan sifat dari perusahaan persekutuan komanditer adalah sulit untuk menarik modal yang telah disetor, modal besar karena didirikan banyak pihak, mudah mendapatkan kredit pinjaman, ada anggota aktif yang memiliki

tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan, relatif mudah untuk didirikan, kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu.

Kelebihan dari perusahaan persekutuan komanditer antara lain adalah pendiriannya relatif mudah, kemampuan manajemennya lebih besar, mudah mendapatkan kredit usaha, dan modal usaha besar. Selain memiliki kelebihan, perusahaan komanditer juga memiliki kekurangan, yaitu kerahasiaan perusahaan tidak terjamin, mudah terjadi konflik antar pemilik modal, dan adanya kemungkinan pemilik modal yang tidak bertanggung jawab.

2.1.2 Akuntansi Badan Usaha Perseorangan

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Wikipedia (<http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi>, tanggal 07 April 2012, jam 19.00), “Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah“. Akuntansi sering kali dinyatakan sebagai bahasa perusahaan (language of business) yang berguna untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi ini merupakan data yang disajikan atau diperoleh perusahaan yang bersifat keuangan dan dinyatakan dalam istilah-istilah moneter. Dapat dikatakan pula bahwa akuntansi merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan dengan cara-cara tertentu yang sistematis dimana objek kegiatan akuntansi adalah transaksi-



transaksi keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang berfungsi sebagai penyedia informasi ekonomi bagi mereka yang membutuhkan.

Menurut Hery (2009:1), "Tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi". Karena dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Akuntansi dibuat secara kuantitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer / manajemen untuk membantu keputusan suatu organisasi.

2.1.2.2 Kerangka Kerja Konseptual

"Kerangka kerja konseptual tidak hanya membantu profesi akuntansi dalam memahami praktik-praktik yang ada, tetapi juga memberikan arahan (pedoman) untuk menangani praktik-praktik akuntansi di masa yang akan datang" (Hery 2009 :29). Kerangka kerja konseptual meliputi tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi akuntansi, elemen-elemen laporan keuangan dan panduan operasional.

1. Tujuan pelaporan keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 menyatakan bahwa :

‘Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).’



Sedangkan menurut Hery (2009 :31), "tujuan keseluruhan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit."

2. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi

Menurut Wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan, tanggal 29 Februari 2012, jam 22:25), "karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai." "Karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi adalah dapat dipahami, relevansi, reliabilitas, komparabilitas, dan konsistensi" (Hery 2009 :32).

"Suatu informasi akuntansi dianggap berkualitas (berguna) jika informasi tersebut mudah dipahami oleh pemakai atau para pengambil keputusan" (Hery 2009 :33). Karakteristik yang kedua adalah relevansi. Relevansi adalah sesuatu yang dapat membedakan. Suatu informasi akuntansi dapat dikatakan relevan apabila dapat membuat perbedaan dalam suatu pengambilan keputusan. Menurut Hery (2009 :33), "karakteristik kualitatif dari informasi yang relevan adalah bahwa informasi tersebut memiliki nilai umpan balik (*feedback value*), prediktif (*predictive value*), dan ketepatan waktu (*timeliness*).". Informasi yang memiliki nilai umpan balik adalah informasi yang dapat membantu pemakai mengoreksi harapan-harapan di masa lampau. Lalu, informasi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk memprediksi atau memperbaiki hasil di masa yang akan datang (memiliki nilai prediktif). Disamping itu, faktor ketepatan waktu juga adalah sangat penting. Ketepatan waktu berarti informasi tersebut harus dapat tersedia pada



saat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan bisnis (ekonomi), karena jika informasi tersebut tersedia pada saat pengambilan keputusan telah dilaksanakan maka informasi tersebut menjadi sia-sia dan dikatakan sudah tidak relevan lagi dalam pengambilan keputusan.

Karakteristik berikutnya adalah reliabilitas (kehandalan). Kehandalan dari suatu informasi akuntansi apabila bebas dari kesalahan. Suatu informasi akuntansi dikatakan handal apabila *verifiability* (dapat dibuktikan bahwa bebas dari kesalahan), *representational faithfulness* (menyatakan sesuai fakta hal-hal yang seharusnya disajikan), *neutrality* (tidak memihak).

Karakteristik selanjutnya adalah komparabilitas. Suatu informasi pada perusahaan akan lebih berguna jika bisa diperbandingkan dengan informasi serupa menyangkut perusahaan lain pada periode waktu yang sama atau dengan informasi serupa dari perusahaan yang sama pada periode waktu yang berbeda. Karakteristik yang terakhir adalah konsistensi, konsistensi berarti sebuah perusahaan menggunakan prinsip dan metode-metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Hery (2009 :36) menyatakan bahwa

"Perusahaan dapat mengubah metode akuntansinya dari metode akuntansi yang satu dengan metode akuntansi lainnya yang diperkenankan, sepanjang dapat menunjukkan bahwa metode yang baru tersebut lebih baik daripada metode akuntansi yang sebelumnya. Kemudian, sifat dan pengaruh perubahan akuntansi tersebut, serta alasannya harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan pada periode terjadinya perubahan."

3. Elemen-elemen laporan keuangan

Adapun yang termasuk di dalam elemen-elemen laporan keuangan adalah aktiva, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian.



Menurut Hery (2009 :39), definisi dari masing-masing kesepuluh elemen laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu.
2. Kewajiban adalah pengorbanan atas manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang timbul dari kewajiban entitas pada saat ini, untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu.
3. Ekuitas adalah kepemilikan atau kepentingan residu dalam aktiva entitas, yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajibannya.
4. Investasi oleh pemilik adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) entitas yang dihasilkan dari penyerahan sesuatu yang bernilai oleh entitas lain untuk memperoleh atau meningkatkan bagian kepemilikannya. Aktiva adalah bentuk yang paling umum diterima sebagai investasi oleh pemilik, tetapi investasi yang diterima dari entitas lain ini bisa juga meliputi jasa atau sebaliknya dalam bentuk pemenuhan atau konversi kewajiban entitas.
5. Distribusi kepada pemilik adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) entitas yang disebabkan oleh penyerahan aktiva, jasa, atau terjadinya kewajiban entitas kepada pemilik. Distribusi kepada pemilik ini akan menurunkan bagian kepemilikan (modal) entitas.
6. Laba komprehensif adalah perubahan dalam ekuitas entitas sepanjang suatu periode sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan-keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik. Hal ini meliputi seluruh perubahan dalam ekuitas yang terjadi sepanjang suatu periode, tidak termasuk perubahan yang diakibatkan oleh investor pemilik dan distribusi kepada ke pemilik.
7. Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.
8. Beban adalah arus keluar aktiva atau penggunaan lainnya atas aktiva atau terjadinya (munculnya) kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.
9. Keuntungan adalah kenaikan dalam ekuitas (aktiva bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi periferal (transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidental (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang memengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik.



10. Kerugian adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi perifer (transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidental (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik.

4. Pedoman operasi

Dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu *assumption*, *principles*, dan *constraints*. *Assumption* menentukan dasar dari proses akuntansi. *Principles* adalah aturan spesifik yang mengidentifikasi bagaimana kejadian ekonomi seharusnya dilaporkan dalam proses akuntansi. Sedangkan *constraint* di dalam proses akuntansi berfungsi untuk pengijinan pemberlakuan prinsip di dalam kejadian tertentu atau khusus.

Adapun yang termasuk di dalam asumsi-asumsi akuntansi adalah *economic entity assumption* (aktivitas entitas harus dipisahkan dengan aktivitas dari pemilik dan entitas lain), *time period assumption* (umur ekonomis dari perusahaan dapat dibagi dalam beberapa periode waktu akuntansi), *monetary unit assumption* (hanya aktivitas-aktivitas yang dapat dinilai dengan satuan moneter yang dapat dicatat di dalam pencatatan akuntansi), *going concern assumption* (perusahaan akan beroperasi dalam jangka waktu yang lama untuk mencapai tujuannya). Sedangkan yang termasuk di dalam prinsip-prinsip akuntansi adalah sebagai berikut :

a. Prinsip pengakuan pendapatan

Pendapatan diakui pada periode pendapatan diperoleh dan barang atau jasa sudah diserahkan. Ada 3 (tiga) pendekatan di dalam pengakuan pendapatan yaitu *sales basis* (pendapatan diakui saat penjualan),



percentage of completion method (di dalam kontrak konstruksi jangka panjang, pendapatan diakui sebelum kontrak selesai), dan *installment method* (penerimaan kas dari pelanggan terdiri dari bagian harga pokok penjualan atau bagian laba kotor).

b. Prinsip penandingan

Pengeluaran diakui bukan saat kas dikeluarkan, tapi ketika barang atau jasa telah memberikan pendapatan bagi perusahaan. Pengeluaran harus disesuaikan dengan pendapatan yang diterima.

Biaya merupakan sumber dari terjadinya pengeluaran. Ada 2 (dua) jenis biaya yaitu *expired cost* (biaya yang menghasilkan pendapatan hanya pada 1 (satu) periode tertentu) dan *unexpired cost* (biaya yang menghasilkan pendapatan pada periode yang akan datang). *Expired cost* akan dilaporkan sebagai biaya operasional di dalam laporan laba rugi sedangkan *unexpired cost* akan dicatat sebagai harta didalam neraca, dengan seiring berjalannya waktu *unexpired cost* akan menjadi biaya dan akan dilaporkan sebagai biaya penjualan aktiva atau biaya operasional.

c. Prinsip biaya historis

Sebagian besar aktiva dan kewajiban diukur dan dilaporkan berdasarkan dengan harga perolehannya. Prinsip biaya historis dipilih karena untuk menghindari kekuranghandalan informasi nilai wajar.

Selain asumsi dan prinsip dasar akuntansi, didalam pedoman operasi dikenal juga *constraint*. *Constraint* mengijinkan perusahaan untuk mengubah prinsip akuntansi yang diterima secara umum tanpa mengurangi kegunaan dari informasi yang dilaporkan. Salah satu jenis *constraint* adalah *materiality*.



Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil berdasarkan laporan keuangan dan jumlahnya cukup signifikan.

2.1.2.3 Siklus Akuntansi

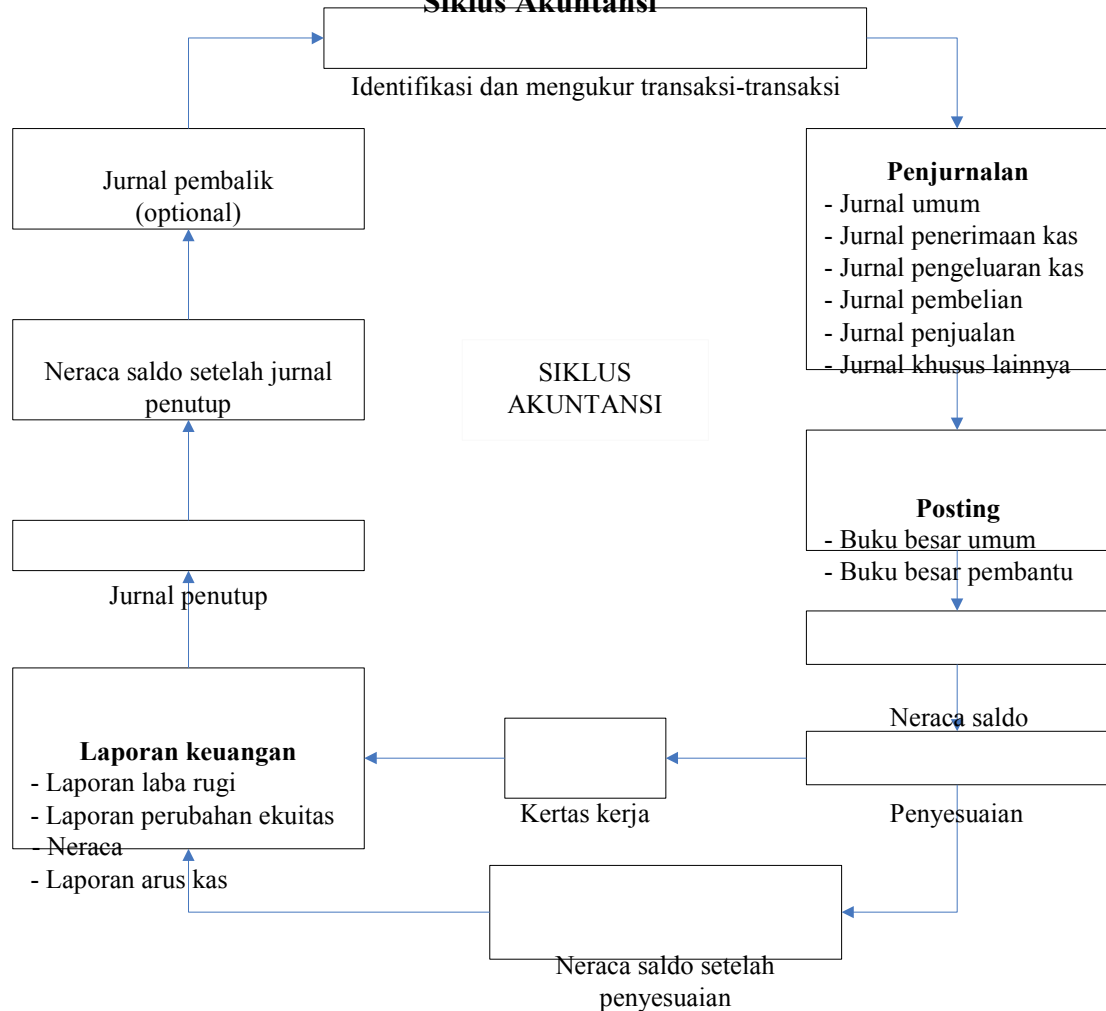
“Siklus akuntansi (accounting cycle) adalah tahap-tahap kegiatan dalam proses pencatatan dan pelaporan akuntansi, mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan dibuatnya laporan keuangan” (Soemarso, 2002:110). Untuk menghasilkan informasi ekonomi, perusahaan perlu menciptakan suatu metode pencatatan, penggolongan, analisis dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan kemudian melaporkan hasilnya. Kegiatan akuntansi meliputi:

1. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan,
2. Pemrosesan data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan, dan
3. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan.



Secara ringkas siklus akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Siklus Akuntansi



Sumber : Intermediate Accounting (Keiso, Weygandt dan Warfield, 2007:68)

Proses tersebut berjalan terus-menerus dan berulang kembali sehingga merupakan suatu arus berputar (siklus). Adapun keterangan gambar diatas adalah:

1. Jurnal umum

Adalah buku harian 2 (dua) lajur yang disediakan untuk mencatat berbagai transaksi-transaksi yang mempengaruhi usaha perusahaan.



2. Jurnal penerimaan kas

Adalah buku jurnal tempat khusus yang mencatat semua penerimaan tunai perusahaan.

3. Jurnal pengeluaran kas

Adalah buku jurnal tempat khusus yang mencatat semua pengeluaran tunai perusahaan.

4. Jurnal pembelian

Adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian-pembelian yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit.

5. Jurnal penjualan

Adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan-penjualan yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit.

6. Buku besar

Adalah sebuah buku yang berisikan seluruh akun-akun harta (*asset*), utang (*liability*) dan ekuitas (*owner's equity*). Setelah bukti transaksi dicatat dalam jurnal, tahap selanjutnya adalah memindahkan data yang terdapat dalam jurnal ke dalam akun-akun yang bersangkutan atau sejenis ke dalam buku besar.

Tahap ini disebut pemindahbukuan (*posting*) ke buku besar.

7. Buku besar pembantu

Adalah sebuah buku yang berisikan detail dari sebuah akun. Misalnya buku besar pembantu utang dan piutang yang berisikan detail nama debitor atau kreditor beserta dengan jumlah saldo utang dan piutangnya untuk memudahkan dalam pencatatan.

8. Neraca saldo

Adalah suatu daftar yang memuat rekening-rekening atau akun-akun dalam buku besar yang disusun pada akhir periode akuntansi. Penyusunan neraca saldo merupakan langkah persiapan untuk penyusunan laporan keuangan.

9. Jurnal penyesuaian

Adalah jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi untuk meyakinkan bahwa prinsip-prinsip dasar akuntansi (*revenue recognition* dan *matching principle*) telah diaplikasikan. Ayat jurnal penyesuaian (*adjustment*) yang dibuat untuk akun tertentu, pada hakikatnya adalah untuk mengoreksi akun-akun tersebut sehingga mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, beban, pendapatan dan modal sebenarnya. Ada 2 (dua) macam keadaan dimana jurnal penyesuaian (*adjustment*) perlu dibuat yaitu:

- a. Keadaan di mana suatu transaksi telah terjadi, tetapi belum dicatat dalam akun,
- b. Keadaan di mana suatu transaksi telah dicatat dalam suatu akun, tetapi saldonya perlu dikoreksi untuk mencerminkan keadaan sebenarnya.

10. Neraca saldo setelah penyesuaian

Adalah neraca saldo setelah disesuaikan dengan ayat jurnal penyesuaian.

11. Kertas kerja

Kertas kerja atau disebut juga neraca lajur (*worksheet*) merupakan suatu daftar berlajur yang dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dan memperlancar penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur atau kertas kerja berisi data yang berguna untuk menyusun laporan keuangan yaitu laporan Laba/Rugi, laporan perubahan modal dan neraca. Kolom-kolom yang ada di



kertas kerja antara lain adalah *trial balance columns* (berisikan saldo-saldo awal dari akun-akun yang ada di perusahaan), *adjustment columns* (berisikan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk menyesuaikan akun-akun di perusahaan), *adjusted trial balance* (merupakan saldo-saldo per akun setelah saldo awal dikurangi dengan saldo penyesuaian), *income statement* (berisikan saldo-saldo akun yang merupakan bagian dari akun-akun laporan laba rugi), dan *balance sheet* (berisikan saldo-saldo akun yang merupakan bagian dari akun-akun neraca).

12. Laporan keuangan

Hasil akhir siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Secara umum laporan keuangan terdiri atas laporan laba-rugi, laporan perubahan modal dan laporan neraca. Namun dalam praktiknya, selain ketiga laporan tersebut sering disusun juga laporan lainnya yang bersifat membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, seperti laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.3 Penentuan Saldo Awal

Adapun cara penentuan saldo awal dari pos-pos yang ada di laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Saldo kas dan saldo bank

Langkah pertama yang dilakukan adalah mereview dokumentasi, seperti jumlah kas per hari, slip penyetoran, dan rekening koran beberapa hari



sebelum dan sesudah akhir tahun. Langkah kedua adalah mencocokkan saldo buku kas dan buku bank. Taksir juga pos-pos rekonsiliasi yang penting termasuk cek-cek yang telah dikeluarkan, tetapi blum diuangkan. Jika memungkinkan dapat dilakukan pengujian arus kas (saldo kas awal tahun + penerimaan kas – pengeluaran kas = saldo kas akhir tahun).

2. Saldo piutang usaha

Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah mendapatkan daftar rincian piutang usaha (buku piutang) dengan informasi berupa nama debitur dan jumlah piutang usaha kemudian periksa bukti-bukti pendukung piutang atau pelunasan piutang setelah tanggal neraca.

3. Saldo persediaan

Biasanya perusahaan menggunakan metode fisik untuk melakukan verifikasi atas akurasi dari pencatatan persediaan secara perpetual, atau apabila tidak ada pencatatan persediaan. Penggunaan metode fisik sangatlah tidak praktis karena ketidakefisienan waktu. Dalam beberapa kasus, perusahaan menggunakan pengukuran substitusi untuk memperkirakan persediaan yang ada.

Ada 2 (dua) pengukuran substitusi untuk menentukan jumlah persediaan, yaitu metode *gross profit* atau metode *gross margin* dan metode *retail inventory*. Metode gross profit adalah metode yang sering digunakan auditor dalam situasi di mana mereka memerlukan hanya suatu perkiraan dari persediaan perusahaan. Perusahaan juga sering menggunakan metode ini ketika persediaannya atau catatan persediaannya hilang atau mengalami



kerusakan. Sedangkan metode *retail inventory* lebih cocok digunakan untuk perusahaan retail yang mempunyai banyak spesifikasi item.

4. Saldo biaya dibayar dimuka

Saldo awal ditentukan dengan cara mendapatkan dan memeriksa apakah biaya dibayar dimuka memiliki manfaat sama atau kurang dari 1 (satu) tahun. Kemudian menghitung jumlah biaya dibayar dimuka yang seharusnya dibebankan pada periode tersebut.

5. Saldo harta tetap

Saldo awal ditentukan dengan cara melakukan inspeksi pada aktiva tetap. Inspeksi aktiva tetap berupa kunjungan langsung, dan memperoleh daftar aktiva tetap yang terinci dengan informasi berupa jenis aktiva, umur ekonomis aktiva, dan harga perolehan aktiva.

6. Saldo hutang usaha

Saldo awal ditentukan dengan cara memeriksa dokumentasi dari hutang (nota pembelian) yang masih belum dilunasi pada akhir atau awal tahun.

7. Saldo modal

Saldo awal ditentukan dengan cara mendapatkan analisa modal yang menunjukkan rincian jumlah modal yang disetor. Kemudian dapatkan analisa untuk unsure-unsur tambahan modal yang disetor dan laba yang ditahan (saldo pada awal tahun, perubahan selama tahun berjalan, dan saldo pada akhir tahun).



2.1.4 Subjek Pajak Penghasilan

"Subyek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan" (Radianto, 2010:1). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 1, disebutkan bahwa yang menjadi subyek pajak adalah :

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Orang pribadi dianggap sebagai subyek pajak dalam negeri apabila bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Badan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa :

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha



yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT).

2.1.5 Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.



Sedangkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak antara lain adalah:

- a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan usaha yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
- l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan



Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.1.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, kewajiban wajib pajak antara lain adalah meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung sendiri pajak terutang, menyetor pajak terutang, melaporkan pelaksanaan kewajiban pajak, membuat pembukuan atau pencatatan, keterbukaan fiskal, dan memenuhi sanksi yang dikenakan. Sedangkan hak dari wajib pajak antara lain adalah dapat melakukan pengangsuran pembayaran, pengurangan PPh 25, pengurangan Pajak Bumi Bangunan (PBB), pembebasan pajak, pajak ditanggung pemerintah, insentif perpajakan, penundaan pelaporan SPT tahunan, restitusi, bias mengajukan keberatan, banding, serta peninjauan kembali (PK).

2.1.7 Pajak Penghasilan Badan

2.1.7.1 Pembukuan dan Pencatatan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 29 dikatakan bahwa :

“Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut“.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, pasal 28 angka 1



dikatakan bahwa : “Pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan obyek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final”.

Pihak yang wajib melaksanakan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan pihak yang tidak wajib melaksanakan pembukuan tetapi wajib melaksanakan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto serta wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.1.7.2 Biaya Pengurang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a. Biaya pembelian bahan;
 - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - c. Bunga, sewa, dan royalti;
 - d. Biaya perjalanan;
 - e. Biaya pengolahan limbah;
 - f. Premi asuransi;
 - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;





- h. Biaya administrasi; dan
- i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- 2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- 5. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- 7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf k yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- 13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.7.3 Penyusutan atau Amortisasi

Berdasarkan Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Penyusutan aktiva tetap dan amortisasi harta tak berwujud tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan (biaya



fiskal). Pada dasarnya, tujuan penyusutan atau amortisasi aktiva tetap menurut UU PPh (fiskal) sama dengan menurut akuntansi atau komersial. Tujuan penyusutan dan amortisasi komersial dimaksudkan untuk mengalokasikan nilai perolehan ke masa manfaat aktiva tetap dan harta tak berwujud tersebut untuk dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung laba neto.

Metode penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi banyak jenisnya. Namun metode penyusutan dan amortisasi untuk kepentingan penghitungan pajak telah diatur tersendiri dalam UU PPh dengan tujuan adanya keseragaman.

"Penyusutan adalah konsep alokasi harga perolehan aktiva tetap berwujud, dan amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam" (Radianto, 2010:29).

Tabel 2.1
Tarif Penyusutan

Kelompok Aktiva Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Depresiasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan bangunan :			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan :			
Permanen	20 tahun	5 %	-
Tidak permanen	10 tahun	10%	-

Sumber : Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari (Radianto, 2010:29)



Ketentuan penyusutan aktiva tetap (harta berwujud) menurut pasal 10 UU

PPh :

1. Harta yang dapat yang dapat disusutkan adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang menjadi objek pajak, kecuali tanah
2. Harta yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal, misalnya: bangunan untuk tempat tinggal karyawan bukan di daerah terpencil yang ditetapkan Menteri Keuangan. Keuntungan penjualan harta tersebut merupakan objek PPh, namun apabila terjadi kerugian tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal.
3. Penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta tersebut dipergunakan.

Penentuan harga perolehan aktiva tetap sangat penting karena harga perolehan menjadi dasar untuk menghitung besarnya biaya penyusutan tiap-tiap tahun. Adapun ketentuan sesuai dengan pasal 10 UU PPh, penentuan harga perolehan aktiva tetap sebagai berikut:

1. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.
2. Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.
3. Nilai perolehan atau nilai pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
4. Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah.
 - a. Yang memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak bagi yang menerima pengalihan, sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.



- b. Yang tidak memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak bagi yang menerima pengalihan, sama dengan nilai pasar dan harta tersebut.
5. Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka penyetoran modal bagi badan yang menerima pengalihan, sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.

Sedangkan waktu dilakukannya penyusutan menurut pasal 10 UU PPh adalah sebagai berikut:

1. pada bulan dilakukannya pengeluaran; atau
2. pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata; atau
3. dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; atau
4. dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan yakni saat mulai memproduksi dan bukan saat diterima atau diperolehnya penghasilan

Metode penyusutan aktiva tetap yang diperkenankan UU Perpajakan dan dasar penyusutan:

1. Metode garis lurus (*straight line method*)

Dasar penyusutan adalah harga perolehan. Penyusutan dengan metode garis lurus adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Contoh Penghitungan penyusutan dengan metode garis lurus : PT. Sumber Makmur membeli sebuah aktiva yang termasuk dalam kelompok I harta berwujud seharga Rp.100.000.000 pada tanggal 10 Juli 2009, maka pembebanan atas biaya penyusutan aktiva tersebut berdasarkan metode garis lurus adalah sebagai berikut :

Tahun	Harga Perolehan	%Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
2009	Rp. 100.000.000	25%	Rp. 12.500.000	Rp. 87.500.000
2010		25%	Rp. 25.000.000	Rp. 62.500.000
2011		25%	Rp. 25.000.000	Rp. 37.500.000
2012		25%	Rp. 25.000.000	Rp. 12.500.000
2013		25%	Rp. 12.500.000	Rp. 0

Keterangan:

Untuk tahun 2009 biaya penyusutan dihitung berdasarkan $6/12 \times 25\% \times$ biaya perolehan, karena pembelian dimulai pada bulan Juli 2009 sehingga biaya yang diperkenankan hanya dari bulan Juli 2009 sampai Desember 2009 yaitu selama 6 bulan. Sedangkan untuk tahun 2013 biaya penyusutan dihitung berdasarkan $6/12 \times 25\% \times$ biaya perolehan, karena sisa masa manfaat hanya untuk bulan Januari 2011 sampai Juni 2011 yaitu selama 6 bulan.

2. Metode saldo menurun (*declining balance method*)

Dasar penyusutan adalah nilai sisa buku fiskal. Penyusutan dengan metode saldo menurun adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Cara perlakuan nilai sisa buku suatu aktiva tetap pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun adalah nilai sisa buku suatu aktiva pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun harus disusutkan sekaligus.

Contoh penghitungan penyusutan dengan metode saldo menurun:

PT. Jaya Abadi membeli sebuah aktiva yang termasuk dalam kelompok I harta berwujud seharga Rp.100.000.000 pada tanggal 10 Juli 2009, maka pembebanan atas biaya penyusutan aktiva tersebut berdasarkan metode saldo menurun adalah sebagai berikut:

Tahun	Harga Perolehan	%Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
2009	Rp. 100.000.000	50%	Rp. 25.000.000	Rp. 75.000.000
2010		50%	Rp. 32.500.000	Rp. 32.500.000
2011		50%	Rp. 16.250.000	Rp. 16.250.000
2012		50%	Rp. 8.125.000	Rp. 8.125.000
2013	Disusutkan sekaligus	50%	Rp. 8.125.000	Rp. 0



Keterangan :

Untuk tahun 2009 biaya penyusutan dihitung berdasarkan $6/12 \times 50\% \times$ biaya perolehan, karena pembelian dimulai pada bulan Juli 2009 sehingga biaya yang diperkenankan hanya dari bulan Juli 2009 sampai Desember 2009 yaitu selama 6 bulan.

Adapun jenis-jenis harta berwujud menurut Peraturan Menteri Keuangan

Nomor : 96/PMK.03/2009.

Tabel 2.2

Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Dalam Kelompok 1

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. 2. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. 4. Sepeda motor, sepeda dan becak. 5. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. 6. Dies, jigs, dan mould. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan,	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Transportasi dan Pergudangan	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.



Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
5	Industri semi konduktor	Falsh memory tester, writer machine, biporar test system, elimination (PE8-1), pose checker.
6	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris.
7	Jasa telekomunikasi selular	Base Station Controller

Tabel 2.3

Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Dalam Kelompok 2

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. 2. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. 3. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. 2. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan . 2. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kemang gula, mesin pengolah hiii-hiiian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. 3. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. 4. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.





Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan, kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin dan peralatan penebangan kayu. 2. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane bulldozer dan sejenisnya.
7	Transportasi dan Pergudangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk perom truck nganggang, dan sejenisnya;peron 2. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; 3. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; 4. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; 5. Kapal balon.
8	Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat pesawat telepon; 2. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9	Industri semi konduktor	<p>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual</p> <p>01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, reform machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.</p>



Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
10	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Spoolling Machines, Metocean Data Collector
11	Jasa Telekomunikasi Seluler	Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register, Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena

Tabel 2.4
Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Dalam Kelompok 3

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	1. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). 2. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3	Perkayuan	1. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. 2. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri kimia	1. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk piroteknik, korek api, alloy piroforis, barang



		<p>fotografi dan sinematografi.</p> <p>2. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).</p>
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Transportasi dan Pergudangan	<p>1. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>2. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>3. Dok terapung.</p> <p>4. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.</p> <p>5. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.</p>
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Tabel 2.5
Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Dalam Kelompok 4

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Transportasi dan Pergudangan	<p>1. Lokomotif uap dan tender atas rel.</p> <p>2. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</p> <p>3. Lokomotif atas rel lainnya.</p> <p>4. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</p>

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
		<p>5. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p> <p>6. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p> <p>7. Dok-dok terapung.</p>

Penyusutan harta menurut Ketentuan Fiskal (Pasal 11 UUPPh) yaitu:

1. Harta Yang Boleh Disusutkan Menurut Ketentuan Fiskal

- Yaitu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang digunakan untuk mendapatkan menagih, dan memelihara penghasilan (obyek pajak), kecuali tanah.
- Penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata.
- Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.

2. Harta yang tidak boleh disusutkan Menurut Ketentuan Fiskal

- Harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal. Misalnya; kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang oleh karyawan, rumah dinas karyawan yang tidak terletak di daerah terpencil.
- Dalam hal harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual (dialihkan), keuntungannya merupakan obyek PPh, yang dihitung dari selisih antara harga jual (nilai pasar) dengan harga perolehan. Dalam hal selisihnya negatif (rugi), kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.



2.1.7.4 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. "Wajib pajak badan dikenakan tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010" (Radianto, 2010:54).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak tahun 2010, tarif perhitungan PPh terutang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak ada 3, yaitu:

1. Tarif PPh Pasal 17 ayat 1b

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1b tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 28%. Namun demikian berdasarkan Pasal 17 ayat 2a tarif tersebut sejak tahun pajak 2010 menjadi 25%.

PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Penghasilan Kena Pajak.

Contoh :

Jumlah peredaran bruto dalam tahun pajak 2010 Rp 54.000.000.000,00

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam tahun pajak 2010 Rp 4.000.000.000,00

PPh yang terutang = $25\% \times \text{Rp } 4.000.000.000,00 = \text{Rp } 1.000.000.000,00$

Jika Wajib Pajak badan dalam negeri mempunyai peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), maka perhitungan PPh terutangnya menggunakan tarif PPh Pasal 31e.

2. Tarif PPh Pasal 17 ayat 2b

Tarif ini diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Wajib Pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1b dan ayat 2a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Penghasilan Kena Pajak.

Contoh:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam tahun pajak 2010 Rp 1.250.000.000,00

PPh yang terutang = $(25\% - 5\%) \times \text{Rp } 1.250.000.000,00 = \text{Rp } 250.000.000,00$



(Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka)

3. Tarif PPh Pasal 31E

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf b dan ayat 2a yang dikenai atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Perhitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

PPh terutang = 50% x 25% x seluruh Penghasilan Kena Pajak

b. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

PPh terutang = 50% x 25% x seluruh Penghasilan Kena Pajak

PPh Terutang	=	(50% x 25%) x Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	+	25% x Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas
--------------	---	--	---	--

- Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

Rp	
4.800.000.000,00	x Penghasilan Kena Pajak
Peredaran Bruto	

- Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

Contoh 1:

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp 4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 500.000.000,00.

Perhitungan pajak yang terutang yaitu seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00

$$\begin{aligned} \text{PPh yang terutang} &= 50\% \times 25\% \times \text{Rp } 500.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 62.500.000,00 \end{aligned}$$

Contoh 2:



Peredaran bruto PT X dalam Tahun Pajak 2010 sebesar Rp 30.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 3.000.000.000,00.

Perhitungan PPh terutang:

- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

$$= (\text{Rp } 4.800.000.000,00 : \text{Rp } 30.000.000.000,00) \times \text{Rp } 3.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 480.000.000,00$$
- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

$$= \text{Rp } 3.000.000.000,00 - \text{Rp } 480.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 2.520.000.000,00$$
- PPh yang terutang

$$= (50\% \times 25\% \times \text{Rp } 480.000.000,00) + (25\% \times \text{Rp } 2.520.000.000,00)$$

$$= \text{Rp } 60.000.000,00 + \text{Rp } 630.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 690.000.000,00$$

Catatan: Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

2.1.7.5 Koreksi Fiskal

“Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi kepentingan pihak eksternal perusahaan, dimana aturan dan teknis pencatatannya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia” (Sulistiawan & Feliana, 2006:33). Untuk itu perlu dilakukan koreksi fiskal yaitu proses penyesuaian laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan sehingga dihasilkan laporan keuangan fiskal dimana laporan tersebut yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang .

Ada 2 (dua) jenis koreksi yaitu koreksi positif dan negatif. Yang termasuk di dalam koreksi positif adalah biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan, biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena



pajak (PKP), biaya yang diakui lebih kecil, biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, dan biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final. Sedangkan yang termasuk dalam koreksi negatif adalah biaya yang diakui lebih besar dan penghasilan bukan objek pajak.

2.1.7.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Supramono dan Damayanti (2010:12) menyatakan bahwa :

SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan, penghasilan yang merupakan obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, harta dan kewajiban, serta pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak.

SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia, dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta mendatangi dan menyampaikannya ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan untuk Wajib Pajak Badan paling lambat adalah 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak yaitu 30 April tahun berikutnya. Apabila Wajib Pajak Badan terlambat untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Surat Pemberitahuan Tahunan yang digunakan Wajib Pajak Badan untuk melaporkan pajak terutangnya adalah 1771. SPT 1771 terdiri dari 6 (enam) lampiran.

Lampiran I berisi tentang perhitungan neto fiskal yang memuat tentang penghasilan neto komersial dalam negeri, penghasilan neto komersial luar negeri, jumlah penghasilan neto komersial, penghasilan yang dikenakan PPh final dan



yang tidak termasuk objek pajak, penyesuaian fiskal positif, penyesuaian fiskal negatif, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan netto, dan penghasilan netto fiskal. Lampiran II berisi tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha.

Lampiran III berisi tentang kredit pajak dalam negeri. Lampiran IV berisi tentang PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Lampiran V berisi tentang daftar pemegang saham dan jumlah deviden yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Dan lampiran VI berisi tentang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar pinjaman dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, daftar pinjaman kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Sedangkan SPT induk memuat tentang penghasilan kena pajak, pajak penghasilan terutang, kredit pajak, PPh kurang atau lebih bayar, angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, PPh final dan penghasilan bukan objek pajak dan lampiran.

2.2 Hasil Penelitian terdahulu atau sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Meilyana Kuanda (2010), dengan judul “Perlakuan Akuntansi dan Perhitungan Pajak Penghasilan Toko X”, penelitian tersebut menunjukkan bahwa:

Penelitian skripsi ini adalah studi kasus, yang dilakukan pada toko bahan bangunan “X”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi dan perhitungan pajak penghasilan pada Toko “X” yang berbentuk persekutuan.

Data yang dikumpulkan adalah nota-nota transaksi pembelian, buku kas, buku piutang, daftar aktiva tetap, dan buku bank yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Unit analisis yang digunakan adalah perlakuan akuntansi dan perhitungan pajak penghasilan Toko “X”.



Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dari laporan keuangan yang telah dibuat dapat diketahui laba yang diperoleh, aset yang dimiliki dan total pajak yang terutang.

Dengan membandingkan pada penelitian terdahulu, maka diperoleh persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Persamaan:

1. Perusahaan yang diteliti tidak pernah membuat laporan keuangan.
2. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.
3. Terdapat pemisahan antara aktivitas entitas dengan aktivitas pribadi.

Perbedaan:

1. Bentuk badan usaha yang diteliti terdahulu adalah perusahaan persekutuan sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada perusahaan perorangan.
2. Penelitian terdahulu dilakukan pada Toko "X" yang bergerak dibidang bahan bangunan sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada perusahaan distributor produk-produk curah untuk rumah tangga seperti detergen cair, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, sabun mandi cair, karbol, pewangi laundry, pelicin pakaian, dan lain-lain yang berlokasi di Surabaya.
3. Toko "X" pada penelitian terdahulu tidak melakukan pencatatan persediaan sehingga tidak diketahui nilai persediaan secara akurat sedangkan pada penelitian sekarang perusahaan sudah melakukan pencatatan persediaan sehingga nilai persediaan dapat diketahui secara akurat.



2.2.1 Jurnal Penelitian

Jurnal penelitian pertama diambil dari Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 3, Nomor 11 Juni 2004.

Pengakuan (recognition) dan pengukuran (measurement) penghasilan dan beban sesuai Standar Akuntansi Keuangan berbeda dengan Ketentuan Pajak Penghasilan sehingga jumlah laba komersial (commercial profits) berbeda dengan laba fiskal (taxable income). Sesuai PSAK Nomor 46, perbedaan akuntansi komersial dengan ketentuan Pajak Penghasilan yang memiliki tax effects pada tahun berikutnya harus disajikan secara proporsional pada neraca.

Jurnal penelitian kedua diambil dari Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 2, Nomor 8 Maret 2003.

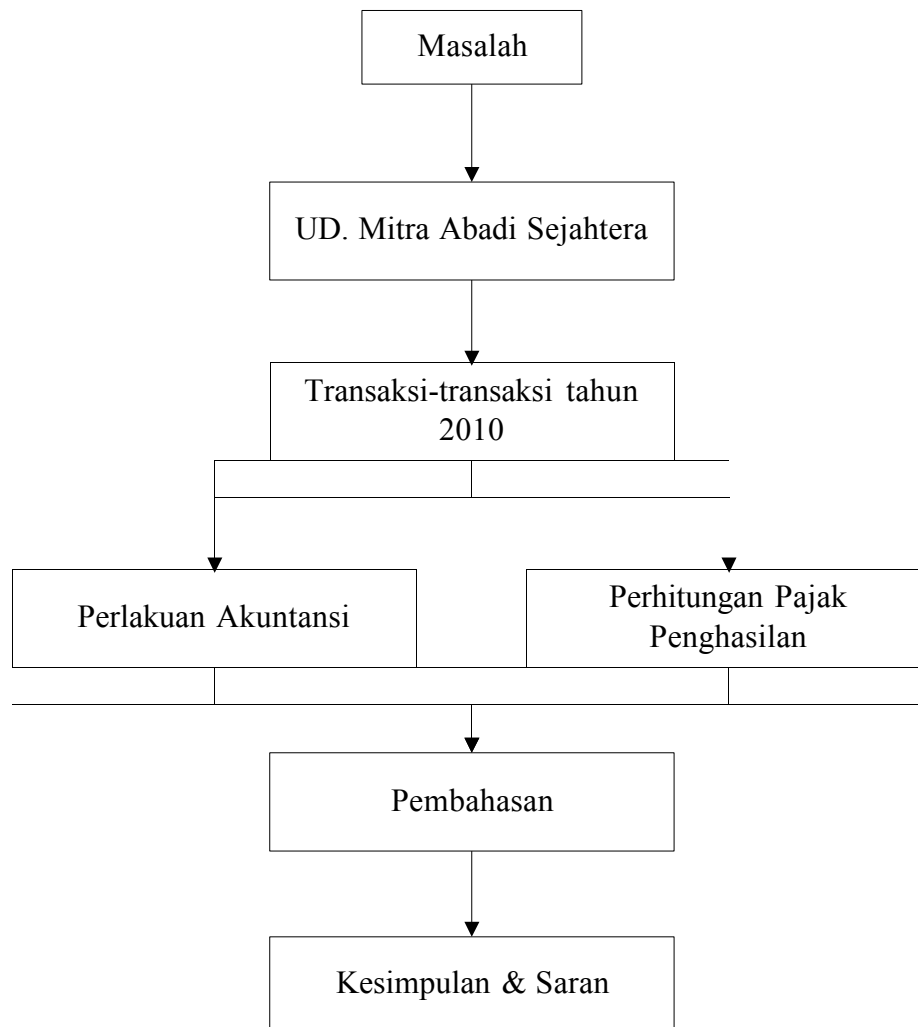
Batas akhir penyampaian SPT PPh Tahun 2002 akan segera berakhir pada tanggal 31 Maret 2003. Dalam pengisian SPT PPh Tahunan diperlukan pemahaman yang lengkap dan menyeluruh mengenai kebijakan PPh teknis pengisiannya. Selain itu, perlu juga untuk mengenal dan memahami tentang prinsip dan konsep PPh. Tulisan ini akan membahas secara garis besar mengenai prinsip dan konsep PPh.

2.3 Rerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta tinjauan pustaka, penelitian ini berusaha untuk menunjukkan perlakuan akuntansi dan perhitungan pajak penghasilan UD. Mitra Abadi Sejahtera yang seharusnya berbadan hukum persekutuan. Oleh karena itu disusun rerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2
Rerangka Pemikiran





BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian atau gambaran

Obyek penulisan dilakukan pada UD. Mitra Abadi Sejahtera yang berlokasi di Kompleks Ruko Surya Inti Permata Blok A50-51 yang terletak di jalan Jemur Andayani, Surabaya, Jawa Timur.

3.2 Pendekatan Penelitian & Sumber Data

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Wikipedia, (http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif, tanggal 23 April 2012, jam 13:30), "Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif."

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari pemilik UD. Mitra Abadi Sejahtera sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu laporan tertulis UD. Mitra Abadi Sejahtera yang relevan dengan penelitian ini.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel (Informan)

Sample yang diambil dalam penelitian ini yaitu nota-nota transaksi pembelian, buku kas, daftar aktiva tetap, dan buku bank UD. Mitra Abadi Sejahtera tahun 2010.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Wawancara, dilakukan dengan cara terstruktur dan meliputi tanya jawab dengan pemilik UD. Mitra Abadi Sejahtera, baik dilakukan secara langsung maupun melalui telepon.
- b. Dokumentasi, dilakukan oleh penulis dengan cara mengcopy dokumen-dokumen yang terkait dengan data-data keuangan UD. Mitra Abadi Sejahtera.

3.5 Satuan Kajian

Satuan kajian meliputi perlakuan akuntansi dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pada UD. Mitra Abadi Sejahtera.

3.6 Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan seperti buku kas, buku rekening bank, buku gudang, dan nota pembelian;
- b. Mengatur ulang data-data tersebut agar lebih sistematis;
- c. Menganalisis kebijakan-kebijakan akuntansi yang sudah atau belum diterapkan oleh UD. Mitra Abadi Sejahtera;
- d. Membuat jurnal khusus meliputi jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan dan pengeluaran kas;
- e. Membuat buku besar;



- f. Membuat kertas kerja untuk memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan;
 - g. Membuat laporan laba rugi komersial;
 - h. Melakukan koreksi fiskal pada laporan laba rugi komersial;
 - i. Menghitung pajak penghasilan badan yang terutang;
 - j. Membuat laporan keuangan (laporan laba rugi, perubahan ekuitas dan neraca)
- UD. Mitra Abadi Sejahtera;
- k. Menarik kesimpulan.



BAB IV HASIL PENELITIAN

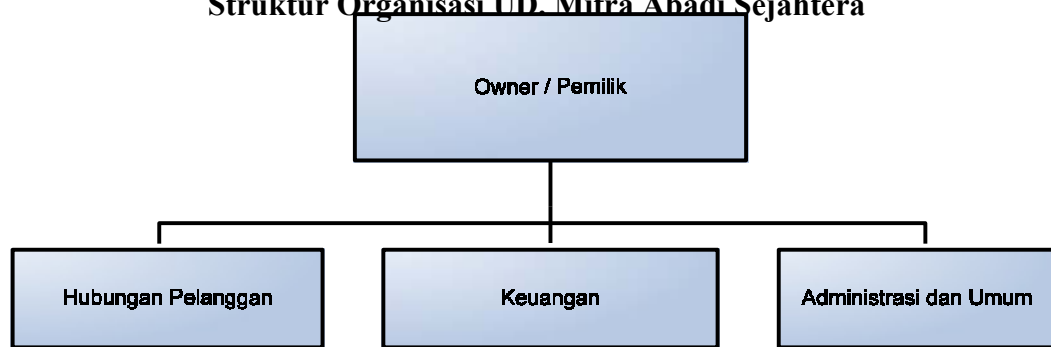
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

UD. Mitra Abadi Sejahtera adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang distribusi produk kebersihan rumah tangga, seperti sabun mandi cair, shampoo, softener, deterjen bubuk matic, dan lain sebagainya. Perusahaan ini didirikan pada bulan September 2007. Perusahaan ini berlokasi di Kompleks Ruko Surya Inti Permata Blok C08-C09 yang terletak di jalan Jemur Andayani, Surabaya, Jawa Timur.

UD. Mitra Abadi Sejahtera dimiliki oleh 3 (tiga) orang yaitu Bapak Michael, Bapak Franklin, dan Bapak Herman. Ketiga pemilik perusahaan masing– masing menyetorkan jumlah modal yang sama dan terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan dengan tingkat tanggung jawab yang telah dibagi di antara para pemilik. Bapak Michael bertanggungjawab atas jumlah persediaan barang di gudang serta pemesanan ke *supplier*, Bapak Franklin bertanggungjawab atas urusan manajemen perusahaan, dan Bapak Herman bertanggungjawab atas urusan penjualan barang serta customer. Adapun struktur organisasi perusahaan ini adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi UD. Mitra Abadi Sejahtera



Berdasarkan struktur organisasi yang ada ada UD. Mitra Abadi Sejahtera tersebut, dapat dijelaskan tugas dan tanggungjawab masing-masing:

1. Hubungan Pelanggan
 - a. Melayani customer, baik yang datang langsung maupun melalui telepon.
 - b. Mencatat semua order customer.
 - c. Menginformasikan segala sesuatu kepada customer baik melalui telepon maupun sms.
2. Keuangan
 - a. Menerima uang tunai dari hasil penjualan.
 - b. Menyetorkan uang ke bank.
 - c. Membuat buku kas.
 - d. Membayar *supplier*.
3. Administrasi dan Umum
 - a. Menyiapkan barang-barang yang dipesan customer.
 - b. Membuat nota penjualan.
 - c. Mengatur jadwal pengiriman apabila customer minta dikirim.
 - d. Mencatat persediaan barang di gudang.



e. Membuat *Purchasing Order* kepada supplier.

UD. Mitra Abadi Sejahtera terdaftar dalam bentuk badan usaha perseorangan dan menggunakan NPWP Bapak Franklin untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Perusahaan memiliki karyawan yang berjumlah 3 orang yang semuanya laki-laki.

Perusahaan ini menjual seluruh barang dagangannya secara tunai dan membeli seluruh barang dagangannya dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan dari tanggal barang diterima.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Selama ini UD. Mitra Abadi Sejahtera belum melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan tapi hanya melakukan pencatatan. Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan mencakup:

1. Buku kas

Berisikan seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk berasal dari penjualan kepada customer. Sedangkan arus kas keluar berasal dari biaya-biaya operasional seperti, bensin, iuran ruko, biaya telepon, listrik, dan lain-lain. Berikut adalah contoh buku kas dan rekap buku kas UD. Mitra Abadi Sejahtera tahun 2010:



Contoh Buku Kas Tahun 2010

TANGGAL	KETERANGAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)
31-Dec-09	Saldo Awal			12,555,600
4-Jan-10	Iuran Ruko		150,000	12,405,600
4-Jan-10	Bensin		50,000	12,355,600
4-Jan-10	Penjualan Tunai Yuwono	1,339,000		13,694,600
4-Jan-10	Setor Bank		12,000,000	1,694,600
4-Jan-10	Penjualan Tunai Hermanto	374,000		2,068,600
5-Jan-10	Penjualan Tunai Faizal	376,000		2,444,600
5-Jan-10	Penjualan Tunai Tanti	1,423,800		3,868,400
5-Jan-10	Utang PPH 25		95,000	3,773,400
6-Jan-10	Air Minum		8,000	3,765,400

Tabel 4.2
Rekap Buku Kas Tahun 2010

Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
Saldo Awal			12.555.600
Januari	31.618.600	42.869.800	1.304.400
Februari	57.703.900	58.637.600	370.700
Maret	45.339.600	44.858.900	851.400
April	30.470.600	30.513.900	808.100
Mei	57.101.400	48.474.200	9.435.300
Juni	37.329.400	45.405.100	1.359.600
Juli	59.141.200	58.977.500	1.523.300
Agustus	56.958.200	51.503.600	6.977.900
September	36.835.500	38.824.700	4.988.700
Oktober	66.134.500	62.833.200	8.290.000
November	70.479.200	70.734.400	8.034.800
Desember	92.048.400	75.415.700	24.667.500
Total	641.160.500	629.048.600	24.667.500



2. Daftar Aktiva

Berisikan nama-nama aktiva yang dimiliki oleh UD. Mitra Abadi Sejahtera, jumlah aktiva, tahun perolehan, dan harga perolehannya.

Tabel 4.3
Daftar Aktiva Tetap

Nama	Jumlah	Harga Perolehan (Rp)	Tanggal Perolehan
Motor Roda 3	1	19.200.000	10/08/2008
AC	1	1.800.000	01/10/2007
Lemari	3	6.000.000	01/10/2007
Meja	4	1.000.000	01/10/2007
Kursi	12	300.000	01/10/2007
Komputer	1	3.000.000	01/10/2007
Printer	1	600.000	01/10/2007
TV 14 inch	2	850.000	01/10/2007
Rak	1	3.500.000	01/10/2007

3. Buku Bank

Berisikan seluruh transaksi-transaksi lewat bank yang dilakukan oleh perusahaan selama tahun 2010. Transaksi-transaksi ini berupa pembayaran kepada supplier dan setoran uang kas dari hasil penjualan. Berikut adalah contoh buku bank tahun 2010.



Contoh Buku Bank

TANGGAL	KETERANGAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)
31-Dec-09	Saldo Awal			45,636,938
4-Jan-10	Terima Dari Kas	12,000,000		57,636,938
8-Jan-10	Terima Dari Kas	4,000,000		61,636,938
8-Jan-10	Bayar Nota 02/12/2009		49,547,800	12,089,138
15-Jan-10	Terima Dari Kas	5,000,000		17,089,138
22-Jan-10	Terima Dari Kas	7,000,000		24,089,138
25-Jan-10	Terima Dari Kas	5,000,000		29,089,138
27-Jan-10	Pindah Dana ke Kas		6,000,000	23,089,138

4. Nota Pembelian

Untuk transaksi pembelian barang dagangan tahun 2010 yang dibeli oleh perusahaan kepada supplier dapat dilihat dari nota pembelian selama tahun 2010. Nota pembelian ini berisikan hal-hal berupa jenis barang, kuantitas, harga barang, diskon yang diberikan dan cara pembayarannya kepada supplier.

5. Nota Penjualan

Untuk transaksi penjualan barang dagangan tahun 2010 yang dijual oleh perusahaan kepada customer dapat dilihat dari nota penjualan selama tahun 2010. Nota penjualan ini berisikan hal-hal berupa jenis barang, kuantitas, harga barang, dan diskon yang diberikan.

4.3 Pembahasan dan Analisa Data

Dari gambaran umum diketahui perusahaan ini belum melakukan pembukuan sesuai kebijakan akuntansi yang ada. Perusahaan belum membuat



laporan keuangan, tidak pernah melakukan penyusutan atas aktiva yang dimilikinya, tidak pernah merekap pembelian yang dilakukan namun perusahaan telah melakukan pencatatan atas persediaan barang dagangannya.

Perusahaan dalam melakukan pembukuannya hanya berupa pencatatan arus kas, buku tabungan, serta melakukan pencatatan persediaan barang dagangan. Oleh karena itu, perusahaan masih belum dapat membuat laporan keuangan.

Dalam melakukan pembukuannya perusahaan telah melakukan 3 (tiga) asumsi akuntansi dari 4 (empat) asumsi yang ada di dalam pedoman operasi *conceptual framework* yaitu umur ekonomis perusahaan dapat dibagi dalam beberapa periode waktu akuntansi (UD. Mitra Abadi Sejahtera telah melakukan pencatatan), hanya aktivitas yang dapat dinilai dengan satuan moneter yang dapat dicatat di dalam pencatatan akuntansi dan perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka waktu panjang untuk mencapai tujuannya.

Asumsi yang masih belum diterapkan sepenuhnya oleh perusahaan adalah pemisahan aktivitas entitas dengan aktivitas pribadi, karena adanya pengambilan barang dagangan untuk keperluan pribadi yang tidak dicatat.

Selain asumsi ada juga prinsip-prinsip akuntansi yang telah diterapkan oleh perusahaan yaitu *revenue recognition principle* yang menggunakan pendekatan *sales basis* (pendapatan diakui saat terjadi penjualan), dan *historical cost principle* (sebagian besar aktiva diukur dan dilaporkan berdasarkan dengan harga perolehannya). Sedangkan prinsip akuntansi yang tidak diterapkan oleh perusahaan adalah *matching principle* karena beban yang dicatat menggunakan pendekatan *cash basis*.



Berikut ini adalah prosedur penyusunan laporan keuangan. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan. Data-data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan neraca. Data-data yang ada meliputi buku kas tahun 2010, nota-nota pembelian, buku bank, nota-nota penjualan, dan daftar aktiva tetap.

Langkah kedua adalah mengatur ulang data-data tersebut agar lebih teratur, misalnya data-data tersebut dikelompokkan secara bulanan, penyamaan nama-nama transaksi, memastikan posisi debet kredit dari transaksi yang ada, menghitung ulang saldo dan membuat rekap pembelian dari nota-nota pembelian.

Langkah ketiga adalah membuat jurnal khusus yang meliputi jurnal pembelian (mencatat terjadinya pembelian secara kredit), jurnal pengeluaran kas (mencatat seluruh pengeluaran kas untuk seluruh beban yang ada), dan jurnal penerimaan kas (mencatat seluruh penerimaan yang bersumber dari penjualan tunai).

Dalam penelitian pada UD. Mitra Abadi Sejahtera, data jurnal pembelian dapat diperoleh dari nota-nota pembelian yang dirangkum sehingga diperoleh jumlah pembelian kredit yang terjadi selama tahun 2010. Dari nota-nota pembelian yang telah dirangkum tersebut juga dapat ditelusuri utang dagang pada akhir tahun dengan cara melihat jatuh tempo pembayaran serta menelusuri ke buku kas tahun 2010 untuk memperoleh kepastian pelunasan utang tersebut. (Rekap pembelian kredit dapat dilihat pada lampiran 3).

Data jurnal penerimaan dan pengeluaran kas diperoleh dari buku kas yang dibuat oleh perusahaan. Buku kas ini berisikan arus kas masuk dan keluar akibat



dari penjualan tunai dan beban-beban yang timbul selama operasional. Untuk mempermudah penelitian, buku kas tersebut telah disort secara *ascending* sesuai dengan nama akunnya sehingga dalam jurnal penerimaan dan pengeluaran telah terkumpul akun-akun yang sejenis dan telah terbagi di dalam debet kredit yang sesuai. Selain buku kas ada juga buku bank. Buku bank berisikan rincian transaksi pembayaran nota lewat transfer dan penyetoran kas ke bank.

Langkah keempat adalah membuat buku besar. Berikut ini adalah buku besar yang telah dibuat.

Tabel 4.5
Buku Besar Bank

BUKU BESAR			
BANK			
Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
Saldo Awal			45,636,938
Terima dari kas	500,300,000		545,936,938
Tarikan untuk kas		43,000,000	502,936,938
Pembayaran hutang dagang		49,547,800	453,389,138
Pembelian		367,191,700	86,197,438
Biaya administrasi		120,000	86,077,438
Pendapatan bunga	557,909		86,635,347
Pajak bunga		111,582	86,523,765



Tabel 4.6
Buku Besar Kas

BUKU BESAR			
KAS			
Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
Saldo Awal			12.555.600
Penjualan	598.160.500	-	610.716.100
Setor ke Bank BCA	-	500.300.000	110.416.100
Terima Dari Bank BCA	43.000.000	-	153.416.100
Angsuran PPH 25	-	1.268.300	152.147.800
Utang PPH 25		150.000	151.997.800
Beban Bensin		2.800.000	149.197.800
Beban Air Minum		704.000	148.493.800
Beban ATK		247.000	148.246.800
Beban Service Motor		1.014.200	147.232.600
Beban Gaji		30.000.000	117.232.600
Prive Tuan Michael		26.000.000	91.232.600
Prive Tuan Franklin		26.000.000	65.232.600
Prive Tuan Herman		26.000.000	39.232.600
Beban Listrik		3.751.700	35.480.900
Beban PDAM		861.600	34.619.300
Beban Telpon		5.282.800	29.336.500
Beban Iuran Ruko		1.800.000	27.536.500
Beban THR		2.500.000	25.036.500
Beban Lain-lain		369.000	24.667.500

Langkah kelima adalah membuat kertas kerja (worksheet). Kertas kerja meliputi neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi dan neraca. Kertas kerja ini dibuat dengan maksud memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. Berikut adalah kertas kerja yang telah dibuat





Tabel 4.6
Kertas Kerja

AKUN-AKUN	NERACA SALDO 31/12/2010		PENYESUAIAN		NS SETELAH		LAPORAN LABA RUGI		NERACA	
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)
Kas	24.667.500	-	-	-	24.667.500	-	-	-	24.667.500	-
Bank	86.523.765	-	-	-	86.523.765	-	-	-	86.523.765	-
PPH 25	1.268.300	-	-	1.268.300	-	-	-	-	-	-
Persediaan	16.283.650	-	-	-	16.283.650	-	-	-	16.283.650	-
Kendaraan	19.200.000	-	-	-	19.200.000	-	-	-	19.200.000	-
Ak penyusutan kendaraan	-	6.300.000	-	3.225.000	-	9.525.000	-	-	-	9.525.000
Peralatan	17.050.000	-	-	-	17.050.000	-	-	-	17.050.000	-
Ak penyusutan peralatan	-	9.112.500	-	3.652.344	-	12.764.844	-	-	-	12.764.844
Utang dagang	-	55.268.300	-	-	-	55.268.300	-	-	-	55.268.300
Modal Tuan Michael	-	13.956.079	-	-	-	13.956.079	-	-	-	13.956.079
Modal Tuan Franklin	-	13.956.079	-	-	-	13.956.079	-	-	-	13.956.079
Modal Tuan Herman	-	13.956.079	-	-	-	13.956.079	-	-	-	13.956.079
Prive Tuan Michael	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-
Prive Tuan Franklin	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-
Prive Tuan Herman	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-
Penjualan	-	598.160.500	-	-	-	598.160.500	-	598.160.500	-	-
Harga pokok penjualan	418.712.350	-	-	-	418.712.350	-	418.712.350	-	-	-
Beban bensin	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-	2.800.000	-	-	-

Tabel 4.6
Kertas Kerja (sambungan)

AKUN-AKUN	NERACA SALDO 31/12/2010		PENYESUAIAN		NS SETELAH		LAPORAN LABA RUGI		NERACA	
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)
Beban air minum	704.000	-	-	-	704.000	-	704.000	-	-	-
Beban ATK	247.000	-	-	-	247.000	-	247.000	-	-	-
Beban service motor	1.014.200	-	-	-	1.014.200	-	1.014.200	-	-	-
Beban lain-lain	369.000	-	-	-	369.000	-	369.000	-	-	-
Beban administrasi	120.000	-	-	-	120.000	-	120.000	-	-	-
Beban gaji	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-
Beban listrik	3.751.700	-	-	-	3.751.700	-	3.751.700	-	-	-
Beban PDAM	861.600	-	-	-	861.600	-	861.600	-	-	-
Beban telpon	5.282.800	-	-	-	5.282.800	-	5.282.800	-	-	-
Beban iuran ruko	1.800.000	-	-	-	1.800.000	-	1.800.000	-	-	-
Beban THR	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-
Beban pajak penghasilan	-	-	15.436.125	-	15.436.125	-	15.436.125	-	-	-
Utang pajak penghasilan	-	-	-	14.167.825	-	14.167.825	-	-	-	14.167.825
Beban penyusutan kendaraan	-	-	3.225.000	-	3.225.000	-	3.225.000	-	-	-
Beban penyusutan peralatan	-	-	3.652.344	-	3.652.344	-	3.652.344	-	-	-
Pendapatan bunga bank	-	557.909	-	-	-	557.909	-	557.909	-	-
Pajak bunga bank	111.582	-	-	-	111.582	-	111.582	-	-	-
Total	711.267.447	711.267.447	22.313.469	22.313.469	732.312.616	732.312.616	490.587.701	598.718.409	241.724.915	133.594.207
Laba bersih							108.130.708			108.130.708
Total							598.718.409	598.718.409	241.724.915	241.724.915



Keterangan:

1. Neraca Saldo

Merupakan neraca yang berisikan akun-akun per tanggal 01 Januari 2010. adapun neraca saldo per tanggal 01 Januari 2010 berisikan akun-akun sebagai berikut:

a. Kas

Saldo kas pada kertas kerja diperoleh dari jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Di dalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas ini terdapat saldo awal tahun 2010, saldo akhir 2010, penerimaan kas di sisi debet dan pengeluaran kas di sisi kredit.

Data jurnal penerimaan dan pengeluaran kas diperoleh dari buku kas perusahaan. Agar tidak terjadi kesalahan perhitungan, dilakukan pengecekan saldo debet dan kredit untuk memastikan bahwa penempatannya sudah benar. Cek fisik kas dilakukan tiap hari oleh pemilik, sehingga saldo kas dibuku dan secara fisiknya selalu sama. Dalam saldo kas perusahaan ini tidak ada uang pribadi pemilik karena pemilik dalam melakukan pencatatan selalu memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan.

Setelah itu dilakukan pengecekan kebenaran saldo kas awal tahun 2010. Pengecekan saldo kas awal tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengujian arus kas.

Rumus pengujian arus kas adalah saldo akhir = saldo awal + penerimaan kas – pengeluaran kas. Apabila yang ingin diuji adalah kebenaran saldo awal maka rumusnya menjadi saldo awal = saldo akhir –



penerimaan kas + pengeluaran kas. Berikut adalah pengujian arus kas atas saldo awal kas tahun 2010 yang bersaldo Rp 12.555.600,00.

$$\begin{aligned}\text{Saldo awal} &= \text{Saldo akhir tahun 2010} - \text{Penerimaan kas} + \\ \text{Pengeluaran kas} &= \text{Rp } 24.904.800,00 - \text{Rp } 641.160.500,00 + \text{Rp } \\ 628.811.300,00 &= \text{Rp } 12.555.600,00\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas telah membuktikan bahwa saldo awal tahun 2010 di buku kas telah sesuai dan saldo akhir kas tahun 2010 dapat diposting ke kertas kerja dalam akun kas. Saldo kas pada akhir tahun 2010 adalah sebesar Rp 24.904.800,00.

b. Bank

Saldo bank diperoleh dari buku tabungan tabungan perusahaan tahun 2010. Rekening pada buku tabungan ini menggunakan nama salah satu pemilik dan dipisahkan dari rekening pribadi pemilik tersebut. Rekening bank ini digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang dagangan kepada supplier. Dari buku bank perusahaan diketahui bahwa saldo buku bank pada akhir tahun 2010 adalah sebesar Rp 87.523.765,00.

c. Persediaan

Persediaan diperoleh dari kartu persediaan perusahaan tahun 2010. Perusahaan telah melakukan pencatatan atas jumlah persediaannya, barang masuk maupun barang keluar telah dicatat setiap harinya. Dari kartu persediaan perusahaan dapat dilihat bahwa saldo akhir persediaan tahun 2010 adalah sebesar Rp 16.283.650,00.



d. Kendaraan

Diperoleh dari daftar aktiva tetap yang diperoleh dari perusahaan. Saldo kendaraan merupakan harga perolehan kendaraan tersebut. Dari daftar aktiva tetap perusahaan dapat dilihat bahwa harga perolehannya adalah Rp 19.200.000,00 sehingga harga tersebutlah yang dimasukkan ke dalam saldo akun kendaraan.

e. Akumulasi penyusutan kendaraan

Merupakan beban penyusutan kendaraan dari tahun awal perolehan hingga akhir tahun 2010. Perhitungan penyusutan kendaraan diperoleh dengan menggunakan metode garis lurus yang menggunakan penggolongan pajak sebagai dasar penentuan tarif penyusutan.

f. Peralatan

Diperoleh dari daftar aktiva tetap yang diperoleh dari perusahaan. Saldo peralatan merupakan seluruh penjumlahan harga perolehan setiap aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, kecuali kendaraan. Aktiva perusahaan dibeli dengan menggunakan kas milik perusahaan.

g. Akumulasi penyusutan peralatan

Merupakan penjumlahan beban penyusutan dari tahun awal perolehan hingga akhir tahun 2010. Perhitungan penyusutan kendaraan diperoleh dengan menggunakan metode garis lurus yang menggunakan penggolongan pajak sebagai dasar penentuan tarif penyusutan. Metode garis lurus dipilih dengan alasan untuk memudahkan pemilik dalam menghitung penyusutan di tahun-tahun berikutnya. Berikut adalah perhitungan penyusutan dari aktiva-aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.



Tabel 4.8
Daftar Aktiva Tetap Perusahaan

KELOMPOK JENIS HARTA	Tgl / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	UMUR EKONOMIS (Tahun)	TABIE PENYUSUTAN
<u>I. BUKAN BANGUNAN</u>				
<u>Kelompok 1</u>				
Lemari	1-Oct-07	6,000,000	4	50%
Meja	1-Oct-07	1,000,000	4	50%
Kursi	1-Oct-07	300,000	4	50%
Komputer	1-Oct-07	3,000,000	4	50%
Printer	1-Oct-07	600,000	4	50%
TV 14 inch	1-Oct-07	850,000	4	50%
Rak	1-Oct-07	3,500,000	4	50%
<u>Kelompok 2</u>				
AC	1-Oct-07	1,800,000	8	25%
Motor roda 3	10-Aug-08	19,200,000	8	25%

Tabel 4.9
Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap
(Metode Saldo Menurun)

1. Lemari

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-			6,000,000
2008	750,000	750,000	5,250,000
2009	2,625,000	3,375,000	2,625,000
2010	1,312,500	4,687,500	1,312,500

2. Meja

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-			1,000,000
2008	125,000	125,000	875,000
2009	437,500	562,500	437,500
2010	218,750	781,250	218,750



3. Kursi

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-			300,000
2008	37,500	37,500	262,500
2009	131,250	168,750	131,250
2010	65,625	234,375	65,625

4. Komputer

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-			3,000,000
2008	375,000	375,000	2,625,000
2009	1,312,500	1,687,500	1,312,500
2010	656,250	2,343,750	656,250

5. Printer

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-			600,000
2008	75,000	75,000	525,000
2009	262,500	337,500	262,500
2010	131,250	468,750	131,250

6. TV 12 inch

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-			850,000
2008	106,250	106,250	743,750
2009	371,875	478,125	371,875
2010	185,938	664,063	185,938

7. Rak

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-			3,500,000
2008	437,500	437,500	3,062,500
2009	1,531,250	1,968,750	1,531,250
2010	765,625	2,734,375	765,625



8. AC

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-			1,800,000
2008	112,500	112,500	1,687,500
2009	421,875	534,375	1,265,625
2010	316,406	850,781	949,219

9. Motor Roda 3

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-			19,200,000
2008	2,000,000	2,000,000	17,200,000
2009	4,300,000	6,300,000	12,900,000
2010	3,225,000	9,525,000	9,675,000

h. Utang dagang

Diperoleh dari jurnal pembelian yang memuat jumlah pembelian kredit dan tanggal pelunasannya. Saldo utang dagang ini diperoleh dari nota transaksi pembelian bulan Desember 2010 yang masi belum dilunasi oleh perusahaan. Saldo utang dagang pada akhir tahun 2010 adalah sebesar Rp 55.268.300,00. Angka saldo utang dagang pada akhir tahun 2010 dapat dilihat pada lampiran 4.

i. Ekuitas

Diperoleh dari tanya jawab dengan ketiga pemilik. Dari tanya jawab tersebut diperoleh keterangan bahwa ketiga pemilik sama-sama mengeluarkan modal yang sama yaitu Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Modal ini disetor pada tahun 2007.



j. Penjualan

Pada perusahaan ini, penjualan hanya dilakukan secara tunai. Saldo penjualan tunai diperoleh dari jurnal penerimaan kas. Diketahui saldo penjualan pada akhir tahun 2010 adalah sebesar Rp 598.160.500,00.

k. Harga pokok penjualan

Diperoleh dengan melihat kartu persediaan. Saldo harga pokok penjualan pada akhir tahun 2010 adalah sebesar Rp 418.712.350,00.

l. Beban-beban

Diperoleh dari jurnal pengeluaran kas yang mencatat seluruh kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar beban-beban yang timbul selama tahun 2010.

2. Jurnal penyesuaian

Berikut adalah jurnal-jurnal penyesuaian yang ada di perusahaan:

a. Beban penyusutan kendaraan	Rp 3.225.000,00
Akumulasi penyusutan kendaraan	Rp 3.225.000,00
(Diambil dari tabel 4.9)	
b. Beban penyusutan peralatan	Rp 3.652.344,00
Akumulasi penyusutan peralatan	Rp 3.652.344,00
(Diambil dari tabel 4.9)	
c. Beban pajak penghasilan	Rp 15.436.125,00
PPH terutang	Rp 14.167.825,00
PPH 25	Rp 1.268.300,00



3. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi perusahaan menggunakan bentuk *multiple step*.

Berikut adalah laporan laba rugi UD. Mitra Abadi Sejahtera untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010.

Tabel 4.10

UD. MITRA ABADI SEJAHTERA		
LAPORAN LABA RUGI		
Untuk Periode yg Berakhir 31 Desember 2010		
	(Rp)	(Rp)
Penjualan		598,160,500
Harga Pokok Penjualan :		
- Persediaan Awal	12,536,000	
- Pembelian	422,460,000	
- Persediaan Akhir	(16,283,650)	
Total HPP		(418,712,350)
Laba Kotor		179,448,150
Beban Operasional :		
- Beban Gaji	30,000,000	
- Beban THR	2,500,000	
- Beban Bensin	2,800,000	
- Beban Air Minum	704,000	
- Beban ATK	247,000	
- Beban Service Motor	1,014,200	
- Beban PDAM	3,961,600	
- Beban Listrik	3,751,700	
- Beban Telpun	5,282,800	
- Beban Iuran Ruko	1,800,000	
- Beban Administrasi	120,000	
- Beban lain-lain	369,000	
- Beban penyusutan kendaraan	3,225,000	
- Beban penyusutan peralatan	3,652,344	
Total Beban Operasional		(56,327,644)
Laba Usaha		123,120,506
Pendapatan Bunga Bank	557,909	
Pajak Bunga Bank	(111,582)	
Laba Bersih Sebelum Pajak		123,566,833
Pajak Penghasilan		15,436,125
Laba Bersih Setelah Pajak		108,130,708



Laporan Perubahan Ekuitas

UD. MITRA ABADI SEJAHTERA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 31 Desember 2010			
	Michael (Rp)	Franklin (Rp)	Herman (Rp)
Modal awal	8,000,000	8,000,000	8,000,000
Laba rugi tahun sebelumnya	5,956,079	5,956,079	5,956,079
Laba bersih	36,043,569	36,043,569	36,043,569
Prive	(26,000,000)	(26,000,000)	(26,000,000)
Modal akhir	23,999,649	23,999,649	23,999,649

Selama ini UD. Mitra Abadi Sejahtera belum pernah membuat laporan keuangan untuk kegiatan operasional perusahaan dan oleh karena keterbatasannya data untuk tahun 2007, 2008, dan 2009 maka tidak dapat diketahui laba atau rugi yang sebenarnya pada tahun-tahun tersebut.

Jumlah laba atau rugi tahun sebelumnya yang terdapat pada laporan perubahan modal di atas diperoleh dari selisih aktiva dan kewajiban serta modal pada tahun sebelumnya.



Neraca

UD. MITRA ABADI SEJAHTERA NERACA

per 31 Desember 2010

AKTIVA (Rp)

Aktiva Lancar

Kas	24,667,500
Bank	86,523,765
Piutang Dagang	-
Persediaan	16,283,650

Jumlah Aktiva Lancar 127,474,915

Aktiva Tetap

Kendaraan	19,200,000
Ak. Penyusutan Kendaraan	(9,525,000)
Peralatan	17,050,000
Ak. Penyusutan Peralatan	(12,764,844)

Jumlah Aktiva 13,960,156

Total Aktiva 141,435,071

Kewajiban Lancar

Utang Dagang	55,268,300
Utang Pajak Penghasilan	14,167,825

Jumlah Kewajiban Lancar 69,436,125

Ekuitas

Modal	24,000,000
Laba Ditahan Tahun Sebelumnya	17,868,238
Laba Ditahan Tahun Ini	108,130,708
Prive	(78,000,000)

Jumlah 71,998,946

Total Kewajiban dan Ekuitas 141,435,071



Laporan Laba Rugi Perpajakan

UD. MITRA ABADI SEJAHTERA LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode yg Berakhir 31 Desember 2010		
	(Rp)	(Rp)
Penjualan		598,160,500
Harga Pokok Penjualan :		
- Persediaan Awal	12,536,000	
- Pembelian	422,460,000	
- Persediaan Akhir	(16,283,650)	
Total HPP		(418,712,350)
Laba Kotor		179,448,150
Beban Operasional :		
- Beban Gaji	30,000,000	
- Beban THR	2,500,000	
- Beban Bensin	2,800,000	
- Beban Air Minum	704,000	
- Beban ATK	247,000	
- Beban Service Motor	1,014,200	
- Beban Listrik	3,751,700	
- Beban PDAM	861,600	
- Beban Telpon	5,282,800	
- Beban Iuran Ruko	1,800,000	
- Beban Administrasi	120,000	
- Beban penyusutan kendaraan	3,225,000	
- Beban penyusutan peralatan	3,652,344	
Total Beban Operasional		(55,958,644)
Laba Usaha		123,489,506
Laba Bersih Sebelum Pajak		123,489,506
Pajak Penghasilan		15,436,125
Laba Bersih Setelah Pajak		108,053,381



Perhitungan PPh Badan

UD. MITRA ABADI SEJAHTERA	
Perhitungan PPh Badan	
Penghasilan netto fiskal	123,489,506
Penghasilan Kena Pajak	123,489,000
PPh terutang (50% X 25%)	15,436,125
Angsuran PPh 25	1,268,300
PPh 29 Ymh Dibayar	14,167,825





BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. UD. Mitra Abadi Sejahtera selama ini belum melakukan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. UD. Mitra Abadi Sejahtera tidak pernah membuat laporan keuangan sehingga pemilik tidak pernah mengetahui labanya serta nilai asetnya secara pasti.
2. UD. Mitra Abadi Sejahtera selama ini menggunakan norma perhitungan untuk menghitung kewajiban perpajakannya sehingga nilai pajak yang dibayarkan cenderung tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dikarenakan perhitungannya juga menggunakan penafsiran pemiliknya.
3. Diketahui dari koreksi fiskal yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa UD. Mitra Abadi Sejahtera mengalami kurang bayar untuk pajak penghasilannya pada tahun 2010.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya UD. Mitra Abadi Sejahtera melakukan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku serta membuat laporan keuangan sehingga pemilik dapat mengetahui labanya serta nilai aetnya secara pasti.

menghitung kewajiban perpajakannya sehingga nilai pajak yang dibayarkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

3. Sebaiknya UD. Mitra Abadi Sejahtera membayar kekurangan pajak penghasilannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Hery. 2009. *Akuntansi Keuangan Menengah I*. Jakarta:Bumi Aksara.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi>. Tanggal 07-April-2012. Jam 19:00.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha. Tanggal 25-Februari-2012. Jam 21:23.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha. Tanggal 07-April-2012, Jam 19.05.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan. Tanggal 29 Februari 2012. Jam 22:25.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif. Tanggal 23 April 2012. Jam 13:30.
- Hutagaol, John. 2004. Perlakuan Beda Akuntansi Komersial dan Pajak Penghasilan Sesuai PSAK 46. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. STIE PERBANAS. Vol.3. No.11 Juni (6-10).
- Hutagaol, John. 2003. Sekilas tentang Prinsip dan Konsep dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. STIE PERBANAS. Vol.2. No.8 Maret (24-28).
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta:Salemba Empat.
- Kieso, D.A., Weygandt, J.J., Warfield, T.D. 2007. *Intermediate Accounting*. (12th ed). Asia:John Wiley Sons.
- Kuanda, Meilyana. 2010. *Perlakuan Akuntansi dan Perhitungan Pajak Penghasilan Toko X*. Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Mursyidi. 2010. *Akuntansi Dasar*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Radianto, Wirawan, ED. 2010. *Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Simangunsong, A dan Sari, E. 2004. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta:Grasindo.
- Soemarso. 2002. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta:Salemba Empat.
- Sugiri, Slamet dan Riyono, Bogat, Agus. 2007. *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta:STIM YKPN.





Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sulistiawan, Dedhy dan Feliana, Yie, Ke. 2006. *Akuntansi Keuangan Menengah I*. Malang:Bayumedia.

Supramono dan Damayanti, Theresia, Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta:Andi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bentuk Badan Usaha di Indonesia

“Badan usaha adalah lembaga atau organisasi yang melakukan kegiatan yang menggerakkan tenaga, pikiran, dan peralatan untuk mencapai sesuatu” (Mursyidi 2010:4). “Bentuk perusahaan secara garis besar dapat diklarifikasikan berdasarkan jumlah pemiliknya, status pemiliknya, dan dari bentuk badan hukumnya” (Simangunsong dan Sari, 2004:27). Simangunsong dan Sari (2004:27) menyatakan bahwa :

Dilihat dari jumlah pemilik, terdiri dari :

- a. Perusahaan perorangan yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau seorang pengusaha.
- b. Perusahaan persekutuan yaitu suatu perusahaan persekutuan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan.

Dilihat dari status pemilik, terdiri dari :

- a. Perusahaan Swasta merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha swasta.
- b. Perusahaan Negara merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Negara yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dilihat dari bentuk hukum, terdiri dari :

- a. Perusahaan Berbadan Hukum, selalu berupa persekutuan, contohnya adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan.
- b. Perusahaan Bukan Badan Hukum, dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan.

Adapun yang dimaksud dengan bentuk badan hukum yaitu badan usaha yang mempunyai kekayaan tersendiri, terpisah dari harta kekayaan para pendirinya atau para pengurusnya. Para anggota ini tidak bertanggung jawab dengan harta kekayaan di luar saham yang dimilikinya. Yang menjadi fokus





Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



dalam penulisan skripsi ini adalah badan-badan usaha yang tidak berbadan hukum yang ada di Indonesia, antara lain :

1. Perusahaan perseorangan

“Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki dan oleh 1 (satu) orang saja” (Sugiri dan Riyono, 2007:12). Pemilik perusahaan memperoleh seluruh laba sekaligus menanggung segala resikonya, resiko yang dihadapi tidak hanya terbatas pada kekayaan perusahaan, tetapi mencakup keseluruhan kekayaan pribadinya. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, jenis serta jumlah produksi terbatas, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit dan alat produksi yang digunakan masih sederhana.

Perusahaan perseorangan memiliki ciri dan sifat antara lain adalah relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan, dimiliki oleh 1 (satu) orang, pengelolaannya lebih sederhana, modal yang diperlukan tidak terlalu besar, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi seluruh keuntungan dinikmati sendiri, jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup tergantung pada pemiliknya dan sewaktu-waktu dapat dipindahtangankan. Kelebihan dari perusahaan perseorangan adalah seluruh keuntungan perusahaan menjadi milik sendiri, mudah mendirikan karena tidak perlu berbadan hukum, pemilik bebas mengambil keputusan, sehingga keputusan tersebut bisa cepat dilaksanakan, sifat kerahasiaan perusahaan terjamin, biaya operasional perusahaan rendah, karena perusahaan tergolong sederhana, dan manajemen perusahaan fleksibel.

Selain memiliki kelebihan, perusahaan perseorangan juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangan antara lain adalah modal perusahaan tidak



terlalu besar, pemilik bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang terjadi, tidak ada pemisahan antara harta perusahaan dengan harta pribadi, pengelolaan dan kelangsungan perusahaan tergantung dari kemampuan pemilik.

2. Persekutuan

“Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, yang menjalankan usahanya dengan nama bersama untuk mencapai tujuan bersama” (Sugiri dan Riyono, 2007:12). Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah persekutuan firma (Fa) dan persekutuan komanditer (CV). Untuk mendirikan badan usaha persekutuan dibutuhkan ijin khusus pada instansi pemerintah yang terkait.

Menurut Wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha, tanggal 07 April 2012, jam 19.05), “Firma (Fa) adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana tiap- tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan”. Semua anggota firma bertanggung jawab penuh baik secara individu maupun bersama-sama terhadap hutang perusahaan.

Perusahaan persekutuan dengan firma memiliki ciri dan sifat antara lain adalah apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi hutang tersebut dengan harta pribadinya, setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin, seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya, keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup, dan seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma, tidak ada keharusan membuat akte pendirian.

Sedangkan kelebihan dari perusahaan persekutuan firma adalah kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara



sesama anggota, pendirian firma relatif lebih mudah karena tidak harus membuat akte pendirian, kebutuhan modal lebih terpenuhi, lebih mudah untuk memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan *financial* yang lebih besar daripada perusahaan perseorangan. Selain memiliki kelebihan, perusahaan persekutuan firma juga memiliki kekurangan, antara lain yaitu tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan, apabila salah seorang anggota membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama maka secara otomatis badan usaha firma menjadi bubar sehingga kelangsungan perusahaan tidak menentu, jika salah satu anggota membuat kerugian, maka kerugian tersebut juga ditanggung oleh anggota yang lain.

Menurut Wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha, tanggal 25 Februari 2012, jam 21:23), “Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan komanditer mengenal 2 istilah yaitu : sekutu aktif dan sekutu pasif..... “. Sekutu aktif atau sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu yang ikut aktif mengelola perusahaan. Sekutu ini bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta pribadinya (tidak terbatas) sedangkan sekutu pasif atau sekutu komanditer atau sekutu diam adalah sekutu yang tidak ikut mengelola perusahaan. Sekutu ini bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang di tanam di dalam persekutuan. Sekutu pasif ini hanya menanam modal saja.

Adapun ciri dan sifat dari perusahaan persekutuan komanditer adalah sulit untuk menarik modal yang telah disetor, modal besar karena didirikan banyak pihak, mudah mendapatkan kredit pinjaman, ada anggota aktif yang memiliki



tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan, relatif mudah untuk didirikan, kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu.

Kelebihan dari perusahaan persekutuan komanditer antara lain adalah pendiriannya relatif mudah, kemampuan manajemennya lebih besar, mudah mendapatkan kredit usaha, dan modal usaha besar. Selain memiliki kelebihan, perusahaan komanditer juga memiliki kekurangan, yaitu kerahasiaan perusahaan tidak terjamin, mudah terjadi konflik antar pemilik modal, dan adanya kemungkinan pemilik modal yang tidak bertanggung jawab.

2.1.2 Akuntansi Badan Usaha Perseorangan

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Wikipedia (<http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi>, tanggal 07 April 2012, jam 19.00), “Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah“. Akuntansi sering kali dinyatakan sebagai bahasa perusahaan (language of business) yang berguna untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi ini merupakan data yang disajikan atau diperoleh perusahaan yang bersifat keuangan dan dinyatakan dalam istilah-istilah moneter. Dapat dikatakan pula bahwa akuntansi merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan dengan cara-cara tertentu yang sistematis dimana objek kegiatan akuntansi adalah transaksi-



transaksi keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang berfungsi sebagai penyedia informasi ekonomi bagi mereka yang membutuhkan.

Menurut Hery (2009:1), "Tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi". Karena dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Akuntansi dibuat secara kuantitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer / manajemen untuk membantu keputusan suatu organisasi.

2.1.2.2 Kerangka Kerja Konseptual

"Kerangka kerja konseptual tidak hanya membantu profesi akuntansi dalam memahami praktik-praktik yang ada, tetapi juga memberikan arahan (pedoman) untuk menangani praktik-praktik akuntansi di masa yang akan datang" (Hery 2009 :29). Kerangka kerja konseptual meliputi tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi akuntansi, elemen-elemen laporan keuangan dan panduan operasional.

1. Tujuan pelaporan keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 menyatakan bahwa :

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).”



Sedangkan menurut Hery (2009 :31), "tujuan keseluruhan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit."

2. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi

Menurut Wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan, tanggal 29 Februari 2012, jam 22:25), "karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai." "Karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi adalah dapat dipahami, relevansi, reliabilitas, komparabilitas, dan konsistensi" (Hery 2009 :32).

"Suatu informasi akuntansi dianggap berkualitas (berguna) jika informasi tersebut mudah dipahami oleh pemakai atau para pengambil keputusan" (Hery 2009 :33). Karakteristik yang kedua adalah relevansi. Relevansi adalah sesuatu yang dapat membedakan. Suatu informasi akuntansi dapat dikatakan relevan apabila dapat membuat perbedaan dalam suatu pengambilan keputusan. Menurut Hery (2009 :33), "karakteristik kualitatif dari informasi yang relevan adalah bahwa informasi tersebut memiliki nilai umpan balik (*feedback value*), prediktif (*predictive value*), dan ketepatan waktu (*timeliness*).". Informasi yang memiliki nilai umpan balik adalah informasi yang dapat membantu pemakai mengoreksi harapan-harapan di masa lampau. Lalu, informasi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk memprediksi atau memperbaiki hasil di masa yang akan datang (memiliki nilai prediktif). Disamping itu, faktor ketepatan waktu juga adalah sangat penting. Ketepatan waktu berarti informasi tersebut harus dapat tersedia pada



saat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan bisnis (ekonomi), karena jika informasi tersebut tersedia pada saat pengambilan keputusan telah dilaksanakan maka informasi tersebut menjadi sia-sia dan dikatakan sudah tidak relevan lagi dalam pengambilan keputusan.

Karakteristik berikutnya adalah reliabilitas (kehandalan). Kehandalan dari suatu informasi akuntansi apabila bebas dari kesalahan. Suatu informasi akuntansi dikatakan handal apabila *verifiability* (dapat dibuktikan bahwa bebas dari kesalahan), *representational faithfulness* (menyatakan sesuai fakta hal-hal yang seharusnya disajikan), *neutrality* (tidak memihak).

Karakteristik selanjutnya adalah komparabilitas. Suatu informasi pada perusahaan akan lebih berguna jika bisa diperbandingkan dengan informasi serupa menyangkut perusahaan lain pada periode waktu yang sama atau dengan informasi serupa dari perusahaan yang sama pada periode waktu yang berbeda. Karakteristik yang terakhir adalah konsistensi, konsistensi berarti sebuah perusahaan menggunakan prinsip dan metode-metode akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Hery (2009 :36) menyatakan bahwa

"Perusahaan dapat mengubah metode akuntansinya dari metode akuntansi yang satu dengan metode akuntansi lainnya yang diperkenankan, sepanjang dapat menunjukkan bahwa metode yang baru tersebut lebih baik daripada metode akuntansi yang sebelumnya. Kemudian, sifat dan pengaruh perubahan akuntansi tersebut, serta alasannya harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan pada periode terjadinya perubahan."

3. Elemen-elemen laporan keuangan

Adapun yang termasuk di dalam elemen-elemen laporan keuangan adalah aktiva, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian.



Menurut Hery (2009 :39), definisi dari masing-masing kesepuluh elemen laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu.
2. Kewajiban adalah pengorbanan atas manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang timbul dari kewajiban entitas pada saat ini, untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu.
3. Ekuitas adalah kepemilikan atau kepentingan residu dalam aktiva entitas, yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajibannya.
4. Investasi oleh pemilik adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) entitas yang dihasilkan dari penyerahan sesuatu yang bernilai oleh entitas lain untuk memperoleh atau meningkatkan bagian kepemilikannya. Aktiva adalah bentuk yang paling umum diterima sebagai investasi oleh pemilik, tetapi investasi yang diterima dari entitas lain ini bisa juga meliputi jasa atau sebaliknya dalam bentuk pemenuhan atau konversi kewajiban entitas.
5. Distribusi kepada pemilik adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) entitas yang disebabkan oleh penyerahan aktiva, jasa, atau terjadinya kewajiban entitas kepada pemilik. Distribusi kepada pemilik ini akan menurunkan bagian kepemilikan (modal) entitas.
6. Laba komprehensif adalah perubahan dalam ekuitas entitas sepanjang suatu periode sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan-keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik. Hal ini meliputi seluruh perubahan dalam ekuitas yang terjadi sepanjang suatu periode, tidak termasuk perubahan yang diakibatkan oleh investor pemilik dan distribusi kepada ke pemilik.
7. Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.
8. Beban adalah arus keluar aktiva atau penggunaan lainnya atas aktiva atau terjadinya (munculnya) kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.
9. Keuntungan adalah kenaikan dalam ekuitas (aktiva bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi periferal (transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidental (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang memengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik.



10. Kerugian adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi perifer (transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidental (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik.

4. Pedoman operasi

Dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu *assumption*, *principles*, dan *constraints*. *Assumption* menentukan dasar dari proses akuntansi. *Principles* adalah aturan spesifik yang mengidentifikasi bagaimana kejadian ekonomi seharusnya dilaporkan dalam proses akuntansi. Sedangkan *constraint* di dalam proses akuntansi berfungsi untuk pengijinan pemberlakuan prinsip di dalam kejadian tertentu atau khusus.

Adapun yang termasuk di dalam asumsi-asumsi akuntansi adalah *economic entity assumption* (aktivitas entitas harus dipisahkan dengan aktivitas dari pemilik dan entitas lain), *time period assumption* (umur ekonomis dari perusahaan dapat dibagi dalam beberapa periode waktu akuntansi), *monetary unit assumption* (hanya aktivitas-aktivitas yang dapat dinilai dengan satuan moneter yang dapat dicatat di dalam pencatatan akuntansi), *going concern assumption* (perusahaan akan beroperasi dalam jangka waktu yang lama untuk mencapai tujuannya). Sedangkan yang termasuk di dalam prinsip-prinsip akuntansi adalah sebagai berikut :

a. Prinsip pengakuan pendapatan

Pendapatan diakui pada periode pendapatan diperoleh dan barang atau jasa sudah diserahkan. Ada 3 (tiga) pendekatan di dalam pengakuan pendapatan yaitu *sales basis* (pendapatan diakui saat penjualan),



percentage of completion method (di dalam kontrak konstruksi jangka panjang, pendapatan diakui sebelum kontrak selesai), dan *installment method* (penerimaan kas dari pelanggan terdiri dari bagian harga pokok penjualan atau bagian laba kotor).

b. Prinsip penandingan

Pengeluaran diakui bukan saat kas dikeluarkan, tapi ketika barang atau jasa telah memberikan pendapatan bagi perusahaan. Pengeluaran harus disesuaikan dengan pendapatan yang diterima.

Biaya merupakan sumber dari terjadinya pengeluaran. Ada 2 (dua) jenis biaya yaitu *expired cost* (biaya yang menghasilkan pendapatan hanya pada 1 (satu) periode tertentu) dan *unexpired cost* (biaya yang menghasilkan pendapatan pada periode yang akan datang). *Expired cost* akan dilaporkan sebagai biaya operasional di dalam laporan laba rugi sedangkan *unexpired cost* akan dicatat sebagai harta didalam neraca, dengan seiring berjalannya waktu *unexpired cost* akan menjadi biaya dan akan dilaporkan sebagai biaya penjualan aktiva atau biaya operasional.

c. Prinsip biaya historis

Sebagian besar aktiva dan kewajiban diukur dan dilaporkan berdasarkan dengan harga perolehannya. Prinsip biaya historis dipilih karena untuk menghindari kekuranghandalan informasi nilai wajar.

Selain asumsi dan prinsip dasar akuntansi, didalam pedoman operasi dikenal juga *constraint*. *Constraint* mengijinkan perusahaan untuk mengubah prinsip akuntansi yang diterima secara umum tanpa mengurangi kegunaan dari informasi yang dilaporkan. Salah satu jenis *constraint* adalah *materiality*.



Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil berdasarkan laporan keuangan dan jumlahnya cukup signifikan.

2.1.2.3 Siklus Akuntansi

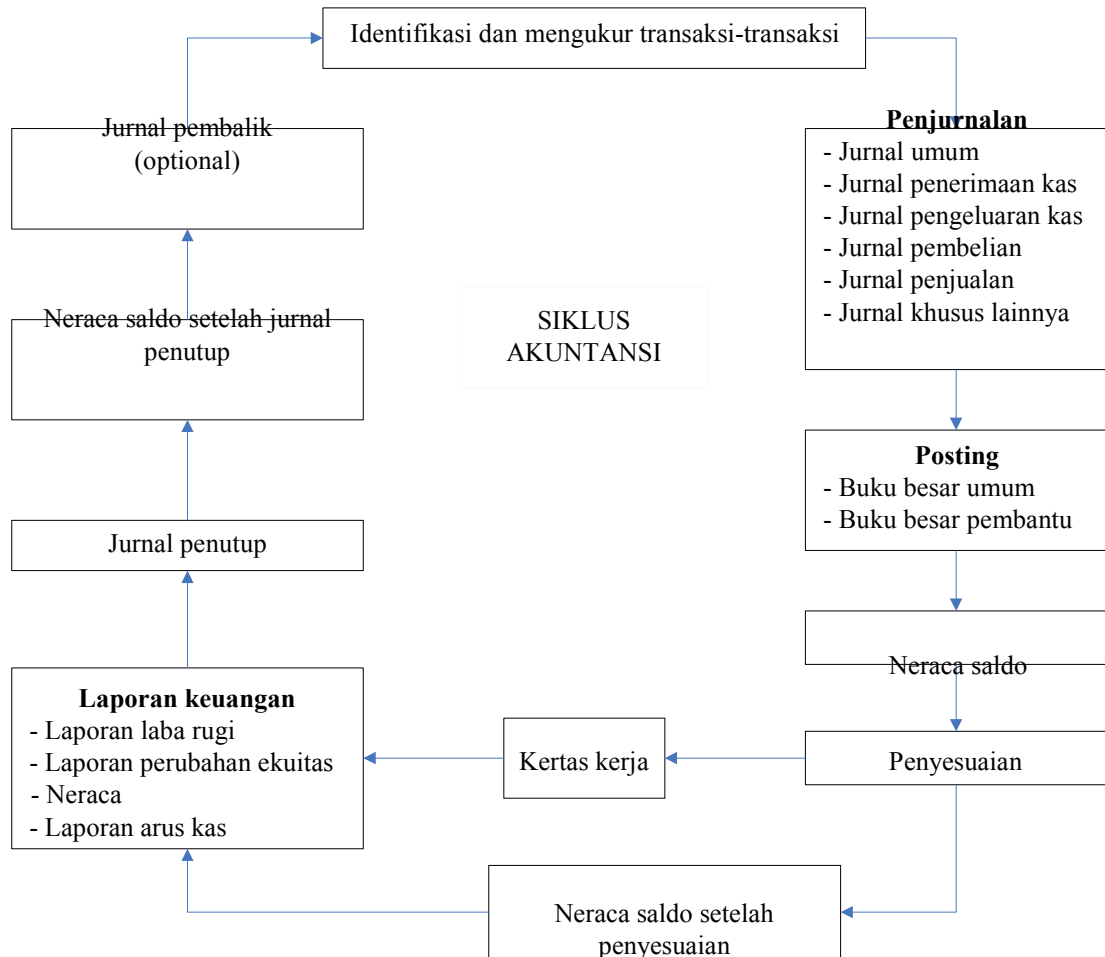
“Siklus akuntansi (accounting cycle) adalah tahap-tahap kegiatan dalam proses pencatatan dan pelaporan akuntansi, mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan dibuatnya laporan keuangan” (Soemarso, 2002:110). Untuk menghasilkan informasi ekonomi, perusahaan perlu menciptakan suatu metode pencatatan, penggolongan, analisis dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan kemudian melaporkan hasilnya. Kegiatan akuntansi meliputi:

1. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan,
2. Pemrosesan data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan, dan
3. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan.



Secara ringkas siklus akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Siklus Akuntansi



Sumber : Intermediate Accounting (Keiso, Weygandt dan Warfield, 2007:68)

Proses tersebut berjalan terus-menerus dan berulang kembali sehingga merupakan suatu arus berputar (siklus). Adapun keterangan gambar diatas adalah:

1. Jurnal umum

Adalah buku harian 2 (dua) lajur yang disediakan untuk mencatat berbagai transaksi-transaksi yang mempengaruhi usaha perusahaan.



2. Jurnal penerimaan kas

Adalah buku jurnal tempat khusus yang mencatat semua penerimaan tunai perusahaan.

3. Jurnal pengeluaran kas

Adalah buku jurnal tempat khusus yang mencatat semua pengeluaran tunai perusahaan.

4. Jurnal pembelian

Adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian-pembelian yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit.

5. Jurnal penjualan

Adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan-penjualan yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit.

6. Buku besar

Adalah sebuah buku yang berisikan seluruh akun-akun harta (*asset*), utang (*liability*) dan ekuitas (*owner's equity*). Setelah bukti transaksi dicatat dalam jurnal, tahap selanjutnya adalah memindahkan data yang terdapat dalam jurnal ke dalam akun-akun yang bersangkutan atau sejenis ke dalam buku besar. Tahap ini disebut pemindahbukuan (*posting*) ke buku besar.

7. Buku besar pembantu

Adalah sebuah buku yang berisikan detail dari sebuah akun. Misalnya buku besar pembantu utang dan piutang yang berisikan detail nama debitor atau kreditor beserta dengan jumlah saldo utang dan piutangnya untuk memudahkan dalam pencatatan.



8. Neraca saldo

Adalah suatu daftar yang memuat rekening-rekening atau akun-akun dalam buku besar yang disusun pada akhir periode akuntansi. Penyusunan neraca saldo merupakan langkah persiapan untuk penyusunan laporan keuangan.

9. Jurnal penyesuaian

Adalah jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi untuk meyakinkan bahwa prinsip-prinsip dasar akuntansi (*revenue recognition* dan *matching principle*) telah diaplikasikan. Ayat jurnal penyesuaian (*adjustment*) yang dibuat untuk akun tertentu, pada hakikatnya adalah untuk mengoreksi akun-akun tersebut sehingga mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, beban, pendapatan dan modal sebenarnya. Ada 2 (dua) macam keadaan dimana jurnal penyesuaian (*adjustment*) perlu dibuat yaitu:

- a. Keadaan di mana suatu transaksi telah terjadi, tetapi belum dicatat dalam akun,
- b. Keadaan di mana suatu transaksi telah dicatat dalam suatu akun, tetapi saldonya perlu dikoreksi untuk mencerminkan keadaan sebenarnya.

10. Neraca saldo setelah penyesuaian

Adalah neraca saldo setelah disesuaikan dengan ayat jurnal penyesuaian.

11. Kertas kerja

Kertas kerja atau disebut juga neraca lajur (*worksheet*) merupakan suatu daftar berlajur yang dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dan memperlancar penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur atau kertas kerja berisi data yang berguna untuk menyusun laporan keuangan yaitu laporan Laba/Rugi, laporan perubahan modal dan neraca. Kolom-kolom yang ada di



kertas kerja antara lain adalah *trial balance columns* (berisikan saldo-saldo awal dari akun-akun yang ada di perusahaan), *adjustment columns* (berisikan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk menyesuaikan akun-akun di perusahaan), *adjusted trial balance* (merupakan saldo-saldo per akun setelah saldo awal dikurangi dengan saldo penyesuaian), *income statement* (berisikan saldo-saldo akun yang merupakan bagian dari akun-akun laporan laba rugi), dan *balance sheet* (berisikan saldo-saldo akun yang merupakan bagian dari akun-akun neraca).

12. Laporan keuangan

Hasil akhir siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Secara umum laporan keuangan terdiri atas laporan laba-rugi, laporan perubahan modal dan laporan neraca. Namun dalam praktiknya, selain ketiga laporan tersebut sering disusun juga laporan lainnya yang bersifat membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, seperti laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.3 Penentuan Saldo Awal

Adapun cara penentuan saldo awal dari pos-pos yang ada di laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Saldo kas dan saldo bank

Langkah pertama yang dilakukan adalah mereview dokumentasi, seperti jumlah kas per hari, slip penyetoran, dan rekening koran beberapa hari



sebelum dan sesudah akhir tahun. Langkah kedua adalah mencocokkan saldo buku kas dan buku bank. Taksir juga pos-pos rekonsiliasi yang penting termasuk cek-cek yang telah dikeluarkan, tetapi blum diuangkan. Jika memungkinkan dapat dilakukan pengujian arus kas (saldo kas awal tahun + penerimaan kas – pengeluaran kas = saldo kas akhir tahun).

2. Saldo piutang usaha

Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah mendapatkan daftar rincian piutang usaha (buku piutang) dengan informasi berupa nama debitur dan jumlah piutang usaha kemudian periksa bukti-bukti pendukung piutang atau pelunasan piutang setelah tanggal neraca.

3. Saldo persediaan

Biasanya perusahaan menggunakan metode fisik untuk melakukan verifikasi atas akurasi dari pencatatan persediaan secara perpetual, atau apabila tidak ada pencatatan persediaan. Penggunaan metode fisik sangatlah tidak praktis karena ketidakefisienan waktu. Dalam beberapa kasus, perusahaan menggunakan pengukuran substitusi untuk memperkirakan persediaan yang ada.

Ada 2 (dua) pengukuran substitusi untuk menentukan jumlah persediaan, yaitu metode *gross profit* atau metode *gross margin* dan metode *retail inventory*. Metode gross profit adalah metode yang sering digunakan auditor dalam situasi di mana mereka memerlukan hanya suatu perkiraan dari persediaan perusahaan. Perusahaan juga sering menggunakan metode ini ketika persediaannya atau catatan persediaannya hilang atau mengalami



kerusakan. Sedangkan metode *retail inventory* lebih cocok digunakan untuk perusahaan retail yang mempunyai banyak spesifikasi item.

4. Saldo biaya dibayar dimuka

Saldo awal ditentukan dengan cara mendapatkan dan memeriksa apakah biaya dibayar dimuka memiliki manfaat sama atau kurang dari 1 (satu) tahun. Kemudian menghitung jumlah biaya dibayar dimuka yang seharusnya dibebankan pada periode tersebut.

5. Saldo harta tetap

Saldo awal ditentukan dengan cara melakukan inspeksi pada aktiva tetap. Inspeksi aktiva tetap berupa kunjungan langsung, dan memperoleh daftar aktiva tetap yang terinci dengan informasi berupa jenis aktiva, umur ekonomis aktiva, dan harga perolehan aktiva.

6. Saldo hutang usaha

Saldo awal ditentukan dengan cara memeriksa dokumentasi dari hutang (nota pembelian) yang masih belum dilunasi pada akhir atau awal tahun.

7. Saldo modal

Saldo awal ditentukan dengan cara mendapatkan analisa modal yang menunjukkan rincian jumlah modal yang disetor. Kemudian dapatkan analisa untuk unsure-unsur tambahan modal yang disetor dan laba yang ditahan (saldo pada awal tahun, perubahan selama tahun berjalan, dan saldo pada akhir tahun).



2.1.4 Subjek Pajak Penghasilan

"Subyek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan" (Radianto, 2010:1). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 1, disebutkan bahwa yang menjadi subyek pajak adalah :

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Orang pribadi dianggap sebagai subyek pajak dalam negeri apabila bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Badan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa :

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha



yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT).

2.1.5 Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.



Sedangkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak antara lain adalah:

- a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan usaha yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
- l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan



Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.1.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, kewajiban wajib pajak antara lain adalah meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung sendiri pajak terutang, menyetor pajak terutang, melaporkan pelaksanaan kewajiban pajak, membuat pembukuan atau pencatatan, keterbukaan fiskal, dan memenuhi sanksi yang dikenakan. Sedangkan hak dari wajib pajak antara lain adalah dapat melakukan pengangsuran pembayaran, pengurangan PPh 25, pengurangan Pajak Bumi Bangunan (PBB), pembebasan pajak, pajak ditanggung pemerintah, insentif perpajakan, penundaan pelaporan SPT tahunan, restitusi, bias mengajukan keberatan, banding, serta peninjauan kembali (PK).

2.1.7 Pajak Penghasilan Badan

2.1.7.1 Pembukuan dan Pencatatan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 29 dikatakan bahwa :

“Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut“.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, pasal 28 angka 1



dikatakan bahwa : “Pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan obyek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final“.

Pihak yang wajib melaksanakan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan pihak yang tidak wajib melaksanakan pembukuan tetapi wajib melaksanakan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto serta wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.1.7.2 Biaya Pengurang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a. Biaya pembelian bahan;
 - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - c. Bunga, sewa, dan royalti;
 - d. Biaya perjalanan;
 - e. Biaya pengolahan limbah;
 - f. Premi asuransi;
 - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;



- h. Biaya administrasi; dan
- i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- 2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- 5. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- 7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf k yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- 13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.7.3 Penyusutan atau Amortisasi

Berdasarkan Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) pembebanan biaya atas perolehan harta berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Penyusutan aktiva tetap dan amortisasi harta tak berwujud tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan (biaya



fiskal). Pada dasarnya, tujuan penyusutan atau amortisasi aktiva tetap menurut UU PPh (fiskal) sama dengan menurut akuntansi atau komersial. Tujuan penyusutan dan amortisasi komersial dimaksudkan untuk mengalokasikan nilai perolehan ke masa manfaat aktiva tetap dan harta tak berwujud tersebut untuk dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung laba neto.

Metode penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi banyak jenisnya. Namun metode penyusutan dan amortisasi untuk kepentingan penghitungan pajak telah diatur tersendiri dalam UU PPh dengan tujuan adanya keseragaman.

"Penyusutan adalah konsep alokasi harga perolehan aktiva tetap berwujud, dan amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam" (Radianto, 2010:29).

Tabel 2.1
Tarif Penyusutan

Kelompok Aktiva Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Depresiasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan bangunan :			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan :			
Permanen	20 tahun	5 %	-
Tidak permanen	10 tahun	10%	-

Sumber : Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari (Radianto, 2010:29)



Ketentuan penyusutan aktiva tetap (harta berwujud) menurut pasal 10 UU

PPh :

1. Harta yang dapat yang dapat disusutkan adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang menjadi objek pajak, kecuali tanah
2. Harta yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal, misalnya: bangunan untuk tempat tinggal karyawan bukan di daerah terpencil yang ditetapkan Menteri Keuangan. Keuntungan penjualan harta tersebut merupakan objek PPh, namun apabila terjadi kerugian tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal.
3. Penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak, penyusutan dapat dimulai pada bulan harta tersebut dipergunakan.

Penentuan harga perolehan aktiva tetap sangat penting karena harga perolehan menjadi dasar untuk menghitung besarnya biaya penyusutan tiap-tiap tahun. Adapun ketentuan sesuai dengan pasal 10 UU PPh, penentuan harga perolehan aktiva tetap sebagai berikut:

1. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.
2. Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.
3. Nilai perolehan atau nilai pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
4. Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka bantuan sumbangan atau hibah.
 - a. Yang memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak bagi yang menerima pengalihan, sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.



- b. Yang tidak memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak bagi yang menerima pengalihan, sama dengan nilai pasar dan harta tersebut.
5. Dasar penilaian harta yang dialihkan dalam rangka penyetoran modal bagi badan yang menerima pengalihan, sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.

Sedangkan waktu dilakukannya penyusutan menurut pasal 10 UU PPh adalah sebagai berikut:

1. pada bulan dilakukannya pengeluaran; atau
2. pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta sehingga penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata; atau
3. dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; atau
4. dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan yakni saat mulai memproduksi dan bukan saat diterima atau diperolehnya penghasilan

Metode penyusutan aktiva tetap yang diperkenankan UU Perpajakan dan dasar penyusutan:

1. Metode garis lurus (*straight line method*)

Dasar penyusutan adalah harga perolehan. Penyusutan dengan metode garis lurus adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Contoh Penghitungan penyusutan dengan metode garis lurus : PT. Sumber Makmur membeli sebuah aktiva yang termasuk dalam kelompok I harta berwujud seharga Rp.100.000.000 pada tanggal 10 Juli 2009, maka pembebanan atas biaya penyusutan aktiva tersebut berdasarkan metode garis lurus adalah sebagai berikut :

Tahun	Harga Perolehan	%Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
2009	Rp. 100.000.000	25%	Rp. 12.500.000	Rp. 87.500.000
2010		25%	Rp. 25.000.000	Rp. 62.500.000
2011		25%	Rp. 25.000.000	Rp. 37.500.000
2012		25%	Rp. 25.000.000	Rp. 12.500.000
2013		25%	Rp. 12.500.000	Rp. 0



Keterangan:

:

Untuk tahun 2009 biaya penyusutan dihitung berdasarkan $6/12 \times 25\% \times$ biaya perolehan, karena pembelian dimulai pada bulan Juli 2009 sehingga biaya yang diperkenankan hanya dari bulan Juli 2009 sampai Desember 2009 yaitu selama 6 bulan. Sedangkan untuk tahun 2013 biaya penyusutan dihitung berdasarkan $6/12 \times 25\% \times$ biaya perolehan, karena sisa masa manfaat hanya untuk bulan Januari 2011 sampai Juni 2011 yaitu selama 6 bulan.

2. Metode saldo menurun (*declining balance method*)

Dasar penyusutan adalah nilai sisa buku fiskal. Penyusutan dengan metode saldo menurun adalah penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Cara perlakuan nilai sisa buku suatu aktiva tetap pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun adalah nilai sisa buku suatu aktiva pada akhir masa manfaat yang disusutkan dengan metode saldo menurun harus disusutkan sekaligus.

Contoh penghitungan penyusutan dengan metode saldo menurun:

PT. Jaya Abadi membeli sebuah aktiva yang termasuk dalam kelompok I harta berwujud seharga Rp.100.000.000 pada tanggal 10 Juli 2009, maka pembebanan atas biaya penyusutan aktiva tersebut berdasarkan metode saldo menurun adalah sebagai berikut:

Tahun	Harga Perolehan	%Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Sisa Buku
2009	Rp. 100.000.000	50%	Rp. 25.000.000	Rp. 75.000.000
2010		50%	Rp. 32.500.000	Rp. 32.500.000
2011		50%	Rp. 16.250.000	Rp. 16.250.000
2012		50%	Rp. 8.125.000	Rp. 8.125.000
2013	Disusutkan sekaligus	50%	Rp. 8.125.000	Rp. 0



Keterangan :

Untuk tahun 2009 biaya penyusutan dihitung berdasarkan $6/12 \times 50\% \times$ biaya perolehan, karena pembelian dimulai pada bulan Juli 2009 sehingga biaya yang diperkenankan hanya dari bulan Juli 2009 sampai Desember 2009 yaitu selama 6 bulan.

Adapun jenis-jenis harta berwujud menurut Peraturan Menteri Keuangan

Nomor : 96/PMK.03/2009.

Tabel 2.2
Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Dalam Kelompok 1

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. 2. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. 4. Sepeda motor, sepeda dan becak. 5. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. 6. Dies, jigs, dan mould. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan,	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Transportasi dan Pergudangan	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.



Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
5	Industri semi konduktor	Falsh memory tester, writer machine, biporar test system, elimination (PE8-1), pose checker.
6	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris.
7	Jasa telekomunikasi selular	Base Station Controller

Tabel 2.3
Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Dalam Kelompok 2

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. 2. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. 3. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. 2. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan . 2. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan koni kemhang gula mesin mengolah hiii-hiiian senerti nenggilingan beras. gandum. tanioka. 3. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. 4. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.



Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan, kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin dan peralatan penebangan kayu. 2. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane bulldozer dan sejenisnya.
7	Transportasi dan Pergudangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk perom truck nganggang, dan sejenisnya;peron 2. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; 3. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; 4. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; 5. Kapal balon.
8	Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat pesawat telepon; 2. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9	Industri semi konduktor	Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.



Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
10	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Spoolling Machines, Metocean Data Collector
11	Jasa Telekomunikasi Seluler	Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register. Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena

Tabel 2.4

Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Dalam Kelompok 3

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	1. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). 2. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3	Perkayuan	1. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. 2. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri kimia	1. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk piroteknik, korek api, alloy piroforis, barang



		<p>fotografi dan sinematografi.</p> <p>2. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).</p>
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Transportasi dan Pergudangan	<p>1. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>2. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>3. Dok terapung.</p> <p>4. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.</p> <p>5. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.</p>
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Tabel 2.5
Jenis-Jenis Harta Berwujud yang Termasuk Dalam Kelompok 4

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Transportasi dan Pergudangan	<p>1. Lokomotif uap dan tender atas rel.</p> <p>2. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</p> <p>3. Lokomotif atas rel lainnya.</p> <p>4. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</p>



Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
		<p>5. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p> <p>6. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</p> <p>7. Dok-dok terapung.</p>

Penyusutan harta menurut Ketentuan Fiskal (Pasal 11 UUPPh) yaitu:

- Harta Yang Boleh Disusutkan Menurut Ketentuan Fiskal
 - Yaitu harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang digunakan untuk mendapatkan menagih, dan memelihara penghasilan (obyek pajak), kecuali tanah.
 - Penyusutan aktiva dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Penyusutan pada tahun pertama dihitung secara pro-rata.
 - Dengan persetujuan Dirjen Pajak, wajib pajak dapat melakukan penyusutan mulai pada bulan digunakannya harta tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.
- Harta yang tidak boleh disusutkan Menurut Ketentuan Fiskal
 - Harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak boleh disusutkan secara fiskal. Misalnya; kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang oleh karyawan, rumah dinas karyawan yang tidak terletak di daerah terpencil.
 - Dalam hal harta yang tidak boleh disusutkan secara fiskal tersebut dijual (dialihkan), keuntungannya merupakan obyek PPh, yang dihitung dari selisih antara harga jual (nilai pasar) dengan harga perolehan. Dalam hal selisihnya negatif (rugi), kerugian tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.



2.1.7.4 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. "Wajib pajak badan dikenakan tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010" (Radianto, 2010:54).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak tahun 2010, tarif perhitungan PPh terutang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak ada 3, yaitu:

1. Tarif PPh Pasal 17 ayat 1b
Berdasarkan Pasal 17 ayat 1b tarif yang diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu sebesar 28%. Namun demikian berdasarkan Pasal 17 ayat 2a tarif tersebut sejak tahun pajak 2010 menjadi 25%.
PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Penghasilan Kena Pajak.
Contoh :
Jumlah peredaran bruto dalam tahun pajak 2010 Rp 54.000.000.000,00
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam tahun pajak 2010 Rp 4.000.000.000,00
$$\text{PPh yang terutang} = 25\% \times \text{Rp } 4.000.000.000,00 = \text{Rp } 1.000.000.000,00$$

Jika Wajib Pajak badan dalam negeri mempunyai peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), maka perhitungan PPh terutangnya menggunakan tarif PPh Pasal 31e.
2. Tarif PPh Pasal 17 ayat 2b
Tarif ini diterapkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Wajib Pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1b dan ayat 2a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
PPh terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Penghasilan Kena Pajak.
Contoh:
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam tahun pajak 2010 Rp 1.250.000.000,00
$$\text{PPh yang terutang} = (25\% - 5\%) \times \text{Rp } 1.250.000.000,00 = \text{Rp } 250.000.000,00$$



(Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka)

3. Tarif PPh Pasal 31E

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf b dan ayat 2a yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Perhitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

PPh terutang = 50% x 25% x seluruh Penghasilan Kena Pajak

b. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

PPh terutang = 50% x 25% x seluruh Penghasilan Kena Pajak

PPh Terutang	=	(50% x 25%) x Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	+	25% x Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas
--------------	---	--	---	--

- Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

$$\frac{\text{Rp } 4.800.000.000,00}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

- Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

Contoh 1:

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp 4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 500.000.000,00.

Perhitungan pajak yang terutang yaitu seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif PPh badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00

$$\begin{aligned} \text{PPh yang terutang} &= 50\% \times 25\% \times \text{Rp } 500.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 62.500.000,00 \end{aligned}$$

Contoh 2:



Peredaran bruto PT X dalam Tahun Pajak 2010 sebesar Rp 30.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 3.000.000.000,00.

Perhitungan PPh terutang:

- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

$$= (\text{Rp } 4.800.000.000,00 : \text{Rp } 30.000.000.000,00) \times \text{Rp } 3.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 480.000.000,00$$
- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

$$= \text{Rp } 3.000.000.000,00 - \text{Rp } 480.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 2.520.000.000,00$$
- PPh yang terutang

$$= (50\% \times 25\% \times \text{Rp } 480.000.000,00) + (25\% \times \text{Rp } 2.520.000.000,00)$$

$$= \text{Rp } 60.000.000,00 + \text{Rp } 630.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 690.000.000,00$$

Catatan: Untuk keperluan penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

2.1.7.5 Koreksi Fiskal

“Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi kepentingan pihak eksternal perusahaan, dimana aturan dan teknis pencatatannya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia” (Sulistiawan & Feliana, 2006:33). Untuk itu perlu dilakukan koreksi fiskal yaitu proses penyesuaian laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan sehingga dihasilkan laporan keuangan fiskal dimana laporan tersebut yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang .

Ada 2 (dua) jenis koreksi yaitu koreksi positif dan negatif. Yang termasuk di dalam koreksi positif adalah biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan, biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena



pajak (PKP), biaya yang diakui lebih kecil, biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, dan biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final. Sedangkan yang termasuk dalam koreksi negatif adalah biaya yang diakui lebih besar dan penghasilan bukan objek pajak.

2.1.7.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Supramono dan Damayanti (2010:12) menyatakan bahwa :

SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan, penghasilan yang merupakan obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, harta dan kewajiban, serta pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak.

SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia, dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta mendatangi dan menyampaikannya ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan untuk Wajib Pajak Badan paling lambat adalah 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak yaitu 30 April tahun berikutnya. Apabila Wajib Pajak Badan terlambat untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Surat Pemberitahuan Tahunan yang digunakan Wajib Pajak Badan untuk melaporkan pajak terutangnya adalah 1771. SPT 1771 terdiri dari 6 (enam) lampiran.

Lampiran I berisi tentang perhitungan neto fiskal yang memuat tentang penghasilan neto komersial dalam negeri, penghasilan neto komersial luar negeri, jumlah penghasilan neto komersial, penghasilan yang dikenakan PPh final dan



yang tidak termasuk objek pajak, penyesuaian fiskal positif, penyesuaian fiskal negatif, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto, dan penghasilan neto fiskal. Lampiran II berisi tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha.

Lampiran III berisi tentang kredit pajak dalam negeri. Lampiran IV berisi tentang PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Lampiran V berisi tentang daftar pemegang saham dan jumlah deviden yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Dan lampiran VI berisi tentang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar pinjaman dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, daftar pinjaman kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Sedangkan SPT induk memuat tentang penghasilan kena pajak, pajak penghasilan terutang, kredit pajak, PPh kurang atau lebih bayar, angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, PPh final dan penghasilan bukan objek pajak dan lampiran.

2.2 Hasil Penelitian terdahulu atau sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Meilyana Kuanda (2010), dengan judul “Perlakuan Akuntansi dan Perhitungan Pajak Penghasilan Toko X”, penelitian tersebut menunjukkan bahwa:

Penelitian skripsi ini adalah studi kasus, yang dilakukan pada toko bahan bangunan “X”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi dan perhitungan pajak penghasilan pada Toko “X” yang berbentuk persekutuan.

Data yang dikumpulkan adalah nota-nota transaksi pembelian, buku kas, buku piutang, daftar aktiva tetap, dan buku bank yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Unit analisis yang digunakan adalah perlakuan akuntansi dan perhitungan pajak penghasilan Toko “X”.



Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dari laporan keuangan yang telah dibuat dapat diketahui laba yang diperoleh, aset yang dimiliki dan total pajak yang terutang.

Dengan membandingkan pada penelitian terdahulu, maka diperoleh persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Persamaan:

1. Perusahaan yang diteliti tidak pernah membuat laporan keuangan.
2. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.
3. Terdapat pemisahan antara aktivitas entitas dengan aktivitas pribadi.

Perbedaan:

1. Bentuk badan usaha yang diteliti terdahulu adalah perusahaan persekutuan sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada perusahaan perorangan.
2. Penelitian terdahulu dilakukan pada Toko "X" yang bergerak dibidang bahan bangunan sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada perusahaan distributor produk-produk curah untuk rumah tangga seperti detergen cair, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, sabun mandi cair, karbol, pewangi laundry, pelicin pakaian, dan lain-lain yang berlokasi di Surabaya.
3. Toko "X" pada penelitian terdahulu tidak melakukan pencatatan persediaan sehingga tidak diketahui nilai persediaan secara akurat sedangkan pada penelitian sekarang perusahaan sudah melakukan pencatatan persediaan sehingga nilai persediaan dapat diketahui secara akurat.



2.2.1 Jurnal Penelitian

Jurnal penelitian pertama diambil dari Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 3, Nomor 11 Juni 2004.

Pengakuan (recognition) dan pengukuran (measurement) penghasilan dan beban sesuai Standar Akuntansi Keuangan berbeda dengan Ketentuan Pajak Penghasilan sehingga jumlah laba komersial (commercial profits) berbeda dengan laba fiskal (taxable income). Sesuai PSAK Nomor 46, perbedaan akuntansi komersial dengan ketentuan Pajak Penghasilan yang memiliki tax effects pada tahun berikutnya harus disajikan secara proporsional pada neraca.

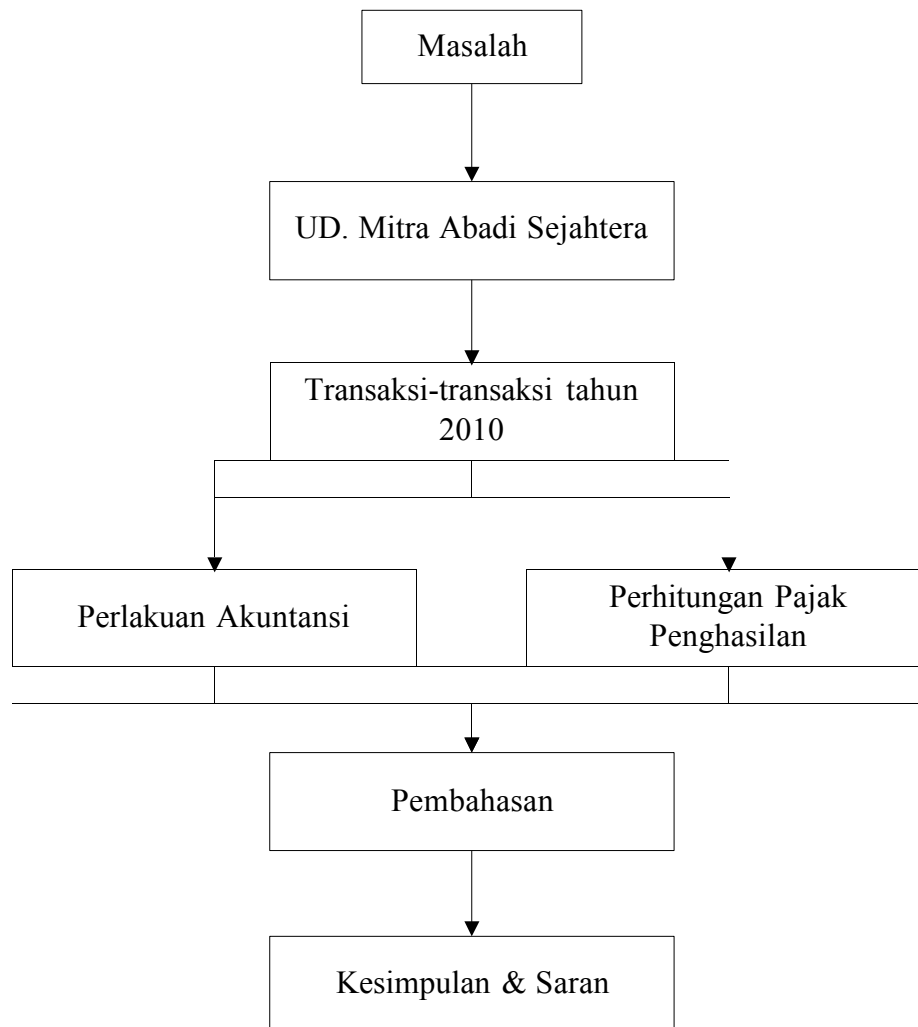
Jurnal penelitian kedua diambil dari Jurnal Perpajakan Indonesia Volume 2, Nomor 8 Maret 2003.

Batas akhir penyampaian SPT PPh Tahun 2002 akan segera berakhir pada tanggal 31 Maret 2003. Dalam pengisian SPT PPh Tahunan diperlukan pemahaman yang lengkap dan menyeluruh mengenai kebijakan PPh teknis pengisiannya. Selain itu, perlu juga untuk mengenal dan memahami tentang prinsip dan konsep PPh. Tulisan ini akan membahas secara garis besar mengenai prinsip dan konsep PPh.

2.3 Rerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta tinjauan pustaka, penelitian ini berusaha untuk menunjukkan perlakuan akuntansi dan perhitungan pajak penghasilan UD. Mitra Abadi Sejahtera yang seharusnya berbadan hukum persekutuan. Oleh karena itu disusun rerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.2
Rerangka Pemikiran





BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian atau gambaran

Obyek penulisan dilakukan pada UD. Mitra Abadi Sejahtera yang berlokasi di Kompleks Ruko Surya Inti Permata Blok A50-51 yang terletak di jalan Jemur Andayani, Surabaya, Jawa Timur.

3.2 Pendekatan Penelitian & Sumber Data

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Wikipedia, (http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif, tanggal 23 April 2012, jam 13:30), "Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif."

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari pemilik UD. Mitra Abadi Sejahtera sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu laporan tertulis UD. Mitra Abadi Sejahtera yang relevan dengan penelitian ini.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel (Informan)

Sample yang diambil dalam penelitian ini yaitu nota-nota transaksi pembelian, buku kas, daftar aktiva tetap, dan buku bank UD. Mitra Abadi Sejahtera tahun 2010.



3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Wawancara, dilakukan dengan cara terstruktur dan meliputi tanya jawab dengan pemilik UD. Mitra Abadi Sejahtera, baik dilakukan secara langsung maupun melalui telepon.
- b. Dokumentasi, dilakukan oleh penulis dengan cara mengcopy dokumen-dokumen yang terkait dengan data-data keuangan UD. Mitra Abadi Sejahtera.

3.5 Satuan Kajian

Satuan kajian meliputi perlakuan akuntansi dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pada UD. Mitra Abadi Sejahtera.

3.6 Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan seperti buku kas, buku rekening bank, buku gudang, dan nota pembelian;
- b. Mengatur ulang data-data tersebut agar lebih sistematis;
- c. Menganalisis kebijakan-kebijakan akuntansi yang sudah atau belum diterapkan oleh UD. Mitra Abadi Sejahtera;
- d. Membuat jurnal khusus meliputi jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan dan pengeluaran kas;
- e. Membuat buku besar;



- f. Membuat kertas kerja untuk memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan;
- g. Membuat laporan laba rugi komersial;
- h. Melakukan koreksi fiskal pada laporan laba rugi komersial;
- i. Menghitung pajak penghasilan badan yang terutang;
- j. Membuat laporan keuangan (laporan laba rugi, perubahan ekuitas dan neraca)

UD. Mitra Abadi Sejahtera;

- k. Menarik kesimpulan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

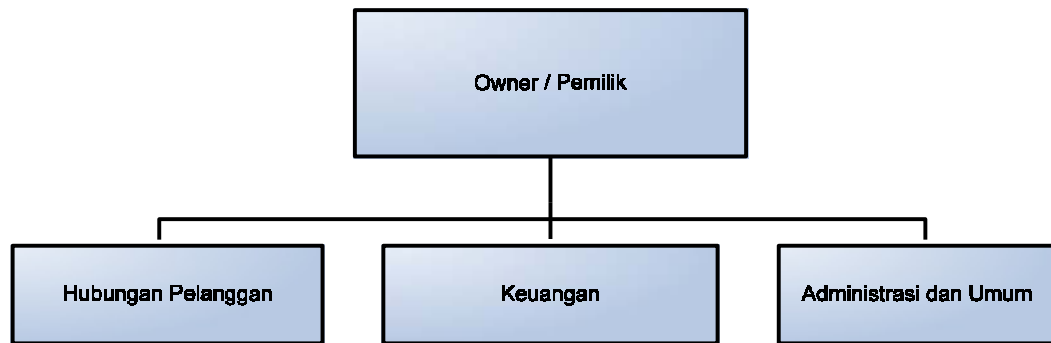
UD. Mitra Abadi Sejahtera adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang distribusi produk kebersihan rumah tangga, seperti sabun mandi cair, shampoo, softener, deterjen bubuk matic, dan lain sebagainya. Perusahaan ini didirikan pada bulan September 2007. Perusahaan ini berlokasi di Kompleks Ruko Surya Inti Permata Blok C08-C09 yang terletak di jalan Jemur Andayani, Surabaya, Jawa Timur.

UD. Mitra Abadi Sejahtera dimiliki oleh 3 (tiga) orang yaitu Bapak Michael, Bapak Franklin, dan Bapak Herman. Ketiga pemilik perusahaan masing– masing menyetorkan jumlah modal yang sama dan terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan dengan tingkat tanggung jawab yang telah dibagi di antara para pemilik. Bapak Michael bertanggungjawab atas jumlah persediaan barang di gudang serta pemesanan ke *supplier*, Bapak Franklin bertanggungjawab atas urusan manajemen perusahaan, dan Bapak Herman bertanggungjawab atas urusan penjualan barang serta customer. Adapun struktur organisasi perusahaan ini adalah sebagai berikut:





Gambar 4.1
Struktur Organisasi UD. Mitra Abadi Sejahtera



Berdasarkan struktur organisasi yang ada ada UD. Mitra Abadi Sejahtera tersebut, dapat dijelaskan tugas dan tanggungjawab masing-masing:

1. Hubungan Pelanggan
 - a. Melayani customer, baik yang datang langsung maupun melalui telepon.
 - b. Mencatat semua order customer.
 - c. Menginformasikan segala sesuatu kepada customer baik melalui telepon maupun sms.
2. Keuangan
 - a. Menerima uang tunai dari hasil penjualan.
 - b. Menyetorkan uang ke bank.
 - c. Membuat buku kas.
 - d. Membayar *supplier*.
3. Administrasi dan Umum
 - a. Menyiapkan barang-barang yang dipesan customer.
 - b. Membuat nota penjualan.
 - c. Mengatur jadwal pengiriman apabila customer minta dikirim.
 - d. Mencatat persediaan barang di gudang.



e. Membuat *Purchasing Order* kepada supplier.

UD. Mitra Abadi Sejahtera terdaftar dalam bentuk badan usaha perseorangan dan menggunakan NPWP Bapak Franklin untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Perusahaan memiliki karyawan yang berjumlah 3 orang yang semuanya laki-laki.

Perusahaan ini menjual seluruh barang dagangannya secara tunai dan membeli seluruh barang dagangannya dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan dari tanggal barang diterima.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Selama ini UD. Mitra Abadi Sejahtera belum melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan tapi hanya melakukan pencatatan. Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan mencakup:

1. Buku kas

Berisikan seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk berasal dari penjualan kepada customer. Sedangkan arus kas keluar berasal dari biaya-biaya operasional seperti, bensin, iuran ruko, biaya telepon, listrik, dan lain-lain. Berikut adalah contoh buku kas dan rekap buku kas UD. Mitra Abadi Sejahtera tahun 2010:



Tabel 4.1
Contoh Buku Kas Tahun 2010

TANGGAL	KETERANGAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)
31-Dec-09	Saldo Awal			12,555,600
4-Jan-10	Iuran Ruko		150,000	12,405,600
4-Jan-10	Bensin		50,000	12,355,600
4-Jan-10	Penjualan Tunai Yuwono	1,339,000		13,694,600
4-Jan-10	Setor Bank		12,000,000	1,694,600
4-Jan-10	Penjualan Tunai Hermanto	374,000		2,068,600
5-Jan-10	Penjualan Tunai Faizal	376,000		2,444,600
5-Jan-10	Penjualan Tunai Tanti	1,423,800		3,868,400
5-Jan-10	Utang PPH 25		95,000	3,773,400
6-Jan-10	Air Minum		8,000	3,765,400

Tabel 4.2
Rekap Buku Kas Tahun 2010

Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
Saldo Awal			12.555.600
Januari	31.618.600	42.869.800	1.304.400
Februari	57.703.900	58.637.600	370.700
Maret	45.339.600	44.858.900	851.400
April	30.470.600	30.513.900	808.100
Mei	57.101.400	48.474.200	9.435.300
Juni	37.329.400	45.405.100	1.359.600
Juli	59.141.200	58.977.500	1.523.300
Agustus	56.958.200	51.503.600	6.977.900
September	36.835.500	38.824.700	4.988.700
Oktober	66.134.500	62.833.200	8.290.000
November	70.479.200	70.734.400	8.034.800
Desember	92.048.400	75.415.700	24.667.500
Total	641.160.500	629.048.600	24.667.500



2. Daftar Aktiva

Berisikan nama-nama aktiva yang dimiliki oleh UD. Mitra Abadi
Sejahtera, jumlah aktiva, tahun perolehan, dan harga perolehannya.

Tabel 4.3
Daftar Aktiva Tetap

Nama	Jumlah	Harga Perolehan (Rp)	Tanggal Perolehan
Motor Roda 3	1	19.200.000	10/08/2008
AC	1	1.800.000	01/10/2007
Lemari	3	6.000.000	01/10/2007
Meja	4	1.000.000	01/10/2007
Kursi	12	300.000	01/10/2007
Komputer	1	3.000.000	01/10/2007
Printer	1	600.000	01/10/2007
TV 14 inch	2	850.000	01/10/2007
Rak	1	3.500.000	01/10/2007

3. Buku Bank

Berisikan seluruh transaksi-transaksi lewat bank yang dilakukan oleh perusahaan selama tahun 2010. Transaksi-transaksi ini berupa pembayaran kepada supplier dan setoran uang kas dari hasil penjualan. Berikut adalah contoh buku bank tahun 2010.



Tabel 4.4
Contoh Buku Bank

TANGGAL	KETERANGAN	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	SALDO (Rp)
31-Dec-09	Saldo Awal			45,636,938
4-Jan-10	Terima Dari Kas	12,000,000		57,636,938
8-Jan-10	Terima Dari Kas	4,000,000		61,636,938
8-Jan-10	Bayar Nota 02/12/2009		49,547,800	12,089,138
15-Jan-10	Terima Dari Kas	5,000,000		17,089,138
22-Jan-10	Terima Dari Kas	7,000,000		24,089,138
25-Jan-10	Terima Dari Kas	5,000,000		29,089,138
27-Jan-10	Pindah Dana ke Kas		6,000,000	23,089,138

4. Nota Pembelian

Untuk transaksi pembelian barang dagangan tahun 2010 yang dibeli oleh perusahaan kepada supplier dapat dilihat dari nota pembelian selama tahun 2010. Nota pembelian ini berisikan hal-hal berupa jenis barang, kuantitas, harga barang, diskon yang diberikan dan cara pembayarannya kepada supplier.

5. Nota Penjualan

Untuk transaksi penjualan barang dagangan tahun 2010 yang dijual oleh perusahaan kepada customer dapat dilihat dari nota penjualan selama tahun 2010. Nota penjualan ini berisikan hal-hal berupa jenis barang, kuantitas, harga barang, dan diskon yang diberikan.

4.3 Pembahasan dan Analisa Data

Dari gambaran umum diketahui perusahaan ini belum melakukan pembukuan sesuai kebijakan akuntansi yang ada. Perusahaan belum membuat



laporan keuangan, tidak pernah melakukan penyusutan atas aktiva yang dimilikinya, tidak pernah merekap pembelian yang dilakukan namun perusahaan telah melakukan pencatatan atas persediaan barang dagangannya.

Perusahaan dalam melakukan pembukuannya hanya berupa pencatatan arus kas, buku tabungan, serta melakukan pencatatan persediaan barang dagangan. Oleh karena itu, perusahaan masih belum dapat membuat laporan keuangan.

Dalam melakukan pembukuannya perusahaan telah melakukan 3 (tiga) asumsi akuntansi dari 4 (empat) asumsi yang ada di dalam pedoman operasi *conceptual framework* yaitu umur ekonomis perusahaan dapat dibagi dalam beberapa periode waktu akuntansi (UD. Mitra Abadi Sejahtera telah melakukan pencatatan), hanya aktivitas yang dapat dinilai dengan satuan moneter yang dapat dicatat di dalam pencatatan akuntansi dan perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka waktu panjang untuk mencapai tujuannya.

Asumsi yang masih belum diterapkan sepenuhnya oleh perusahaan adalah pemisahan aktivitas entitas dengan aktivitas pribadi, karena adanya pengambilan barang dagangan untuk keperluan pribadi yang tidak dicatat.

Selain asumsi ada juga prinsip-prinsip akuntansi yang telah diterapkan oleh perusahaan yaitu *revenue recognition principle* yang menggunakan pendekatan *sales basis* (pendapatan diakui saat terjadi penjualan), dan *historical cost principle* (sebagian besar aktiva diukur dan dilaporkan berdasarkan dengan harga perolehannya). Sedangkan prinsip akuntansi yang tidak diterapkan oleh perusahaan adalah *matching principle* karena beban yang dicatat menggunakan pendekatan *cash basis*.



Berikut ini adalah prosedur penyusunan laporan keuangan. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan. Data-data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan neraca. Data-data yang ada meliputi buku kas tahun 2010, nota-nota pembelian, buku bank, nota-nota penjualan, dan daftar aktiva tetap.

Langkah kedua adalah mengatur ulang data-data tersebut agar lebih teratur, misalnya data-data tersebut dikelompokkan secara bulanan, penyamaan nama-nama transaksi, memastikan posisi debet kredit dari transaksi yang ada, menghitung ulang saldo dan membuat rekap pembelian dari nota-nota pembelian.

Langkah ketiga adalah membuat jurnal khusus yang meliputi jurnal pembelian (mencatat terjadinya pembelian secara kredit), jurnal pengeluaran kas (mencatat seluruh pengeluaran kas untuk seluruh beban yang ada), dan jurnal penerimaan kas (mencatat seluruh penerimaan yang bersumber dari penjualan tunai).

Dalam penelitian pada UD. Mitra Abadi Sejahtera, data jurnal pembelian dapat diperoleh dari nota-nota pembelian yang dirangkum sehingga diperoleh jumlah pembelian kredit yang terjadi selama tahun 2010. Dari nota-nota pembelian yang telah dirangkum tersebut juga dapat ditelusuri utang dagang pada akhir tahun dengan cara melihat jatuh tempo pembayaran serta menelusuri ke buku kas tahun 2010 untuk memperoleh kepastian pelunasan utang tersebut. (Rekap pembelian kredit dapat dilihat pada lampiran 3).

Data jurnal penerimaan dan pengeluaran kas diperoleh dari buku kas yang dibuat oleh perusahaan. Buku kas ini berisikan arus kas masuk dan keluar akibat



dari penjualan tunai dan beban-beban yang timbul selama operasional. Untuk mempermudah penelitian, buku kas tersebut telah disort secara *ascending* sesuai dengan nama akunnya sehingga dalam jurnal penerimaan dan pengeluaran telah terkumpul akun-akun yang sejenis dan telah terbagi di dalam debit kredit yang sesuai. Selain buku kas ada juga buku bank. Buku bank berisikan rincian transaksi pembayaran nota lewat transfer dan penyetoran kas ke bank.

Langkah keempat adalah membuat buku besar. Berikut ini adalah buku besar yang telah dibuat.

Tabel 4.5
Buku Besar Bank

BUKU BESAR			
BANK			
Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
Saldo Awal			45,636,938
Terima dari kas	500,300,000		545,936,938
Tarikan untuk kas		43,000,000	502,936,938
Pembayaran hutang dagang		49,547,800	453,389,138
Pembelian		367,191,700	86,197,438
Biaya administrasi		120,000	86,077,438
Pendapatan bunga	557,909		86,635,347
Pajak bunga		111,582	86,523,765

Tabel 4.6
Buku Besar Kas

BUKU BESAR			
KAS			
Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
Saldo Awal			12.555.600
Penjualan	598.160.500	-	610.716.100
Setor ke Bank BCA	-	500.300.000	110.416.100
Terima Dari Bank BCA	43.000.000	-	153.416.100
Angsuran PPH 25	-	1.268.300	152.147.800
Utang PPH 25		150.000	151.997.800
Beban Bensin		2.800.000	149.197.800
Beban Air Minum		704.000	148.493.800
Beban ATK		247.000	148.246.800
Beban Service Motor		1.014.200	147.232.600
Beban Gaji		30.000.000	117.232.600
Prive Tuan Michael		26.000.000	91.232.600
Prive Tuan Franklin		26.000.000	65.232.600
Prive Tuan Herman		26.000.000	39.232.600
Beban Listrik		3.751.700	35.480.900
Beban PDAM		861.600	34.619.300
Beban Telpon		5.282.800	29.336.500
Beban Iuran Ruko		1.800.000	27.536.500
Beban THR		2.500.000	25.036.500
Beban Lain-lain		369.000	24.667.500

Langkah kelima adalah membuat kertas kerja (worksheet). Kertas kerja meliputi neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi dan neraca. Kertas kerja ini dibuat dengan maksud memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. Berikut adalah kertas kerja yang telah dibuat





Tabel 4.6
Kertas Kerja

AKUN-AKUN	NERACA SALDO 31/12/2010		PENYESUAIAN		NS SETELAH		LAPORAN LABA RUGI		NERACA	
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)
Kas	24.667.500	-	-	-	24.667.500	-	-	-	24.667.500	-
Bank	86.523.765	-	-	-	86.523.765	-	-	-	86.523.765	-
PPH 25	1.268.300	-	-	1.268.300	-	-	-	-	-	-
Persediaan	16.283.650	-	-	-	16.283.650	-	-	-	16.283.650	-
Kendaraan	19.200.000	-	-	-	19.200.000	-	-	-	19.200.000	-
Ak penyusutan kendaraan	-	6.300.000	-	3.225.000	-	9.525.000	-	-	-	9.525.000
Peralatan	17.050.000	-	-	-	17.050.000	-	-	-	17.050.000	-
Ak penyusutan peralatan	-	9.112.500	-	3.652.344	-	12.764.844	-	-	-	12.764.844
Utang dagang	-	55.268.300	-	-	-	55.268.300	-	-	-	55.268.300
Modal Tuan Michael	-	13.956.079	-	-	-	13.956.079	-	-	-	13.956.079
Modal Tuan Franklin	-	13.956.079	-	-	-	13.956.079	-	-	-	13.956.079
Modal Tuan Herman	-	13.956.079	-	-	-	13.956.079	-	-	-	13.956.079
Prive Tuan Michael	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-
Prive Tuan Franklin	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-
Prive Tuan Herman	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-
Penjualan	-	598.160.500	-	-	-	598.160.500	-	598.160.500	-	-
Harga pokok penjualan	418.712.350	-	-	-	418.712.350	-	418.712.350	-	-	-
Beban bensin	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-	2.800.000	-	-	-

Tabel 4.6
Kertas Kerja (sambungan)

AKUN-AKUN	NERACA SALDO 31/12/2010		PENYESUAIAN		NS SETELAH		LAPORAN LABA RUGI		NERACA	
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)
Beban air minum	704.000	-	-	-	704.000	-	704.000	-	-	-
Beban ATK	247.000	-	-	-	247.000	-	247.000	-	-	-
Beban service motor	1.014.200	-	-	-	1.014.200	-	1.014.200	-	-	-
Beban lain-lain	369.000	-	-	-	369.000	-	369.000	-	-	-
Beban administrasi	120.000	-	-	-	120.000	-	120.000	-	-	-
Beban gaji	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-
Beban listrik	3.751.700	-	-	-	3.751.700	-	3.751.700	-	-	-
Beban PDAM	861.600	-	-	-	861.600	-	861.600	-	-	-
Beban telpon	5.282.800	-	-	-	5.282.800	-	5.282.800	-	-	-
Beban iuran ruko	1.800.000	-	-	-	1.800.000	-	1.800.000	-	-	-
Beban THR	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-
Beban pajak penghasilan	-	-	15.436.125	-	15.436.125	-	15.436.125	-	-	-
Utang pajak penghasilan	-	-	-	14.167.825	-	14.167.825	-	-	-	14.167.825
Beban penyusutan kendaraan	-	-	3.225.000	-	3.225.000	-	3.225.000	-	-	-
Beban penyusutan peralatan	-	-	3.652.344	-	3.652.344	-	3.652.344	-	-	-
Pendapatan bunga bank	-	557.909	-	-	-	557.909	-	557.909	-	-
Pajak bunga bank	111.582	-	-	-	111.582	-	111.582	-	-	-
Total	711.267.447	711.267.447	22.313.469	22.313.469	732.312.616	732.312.616	490.587.701	598.718.409	241.724.915	133.594.207
Laba bersih							108.130.708			108.130.708
Total							598.718.409	598.718.409	241.724.915	241.724.915





Keterangan:

1. Neraca Saldo

Merupakan neraca yang berisikan akun-akun per tanggal 01 Januari 2010. adapun neraca saldo per tanggal 01 Januari 2010 berisikan akun-akun sebagai berikut:

a. Kas

Saldo kas pada kertas kerja diperoleh dari jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Di dalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas ini terdapat saldo awal tahun 2010, saldo akhir 2010, penerimaan kas di sisi debet dan pengeluaran kas di sisi kredit.

Data jurnal penerimaan dan pengeluaran kas diperoleh dari buku kas perusahaan. Agar tidak terjadi kesalahan perhitungan, dilakukan pengecekan saldo debet dan kredit untuk memastikan bahwa penempatannya sudah benar. Cek fisik kas dilakukan tiap hari oleh pemilik, sehingga saldo kas dibuku dan secara fisiknya selalu sama. Dalam saldo kas perusahaan ini tidak ada uang pribadi pemilik karena pemilik dalam melakukan pencatatan selalu memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan.

Setelah itu dilakukan pengecekan kebenaran saldo kas awal tahun 2010. Pengecekan saldo kas awal tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengujian arus kas.

Rumus pengujian arus kas adalah $\text{saldo akhir} = \text{saldo awal} + \text{penerimaan kas} - \text{pengeluaran kas}$. Apabila yang ingin diuji adalah kebenaran saldo awal maka rumusnya menjadi $\text{saldo awal} = \text{saldo akhir} -$



penerimaan kas + pengeluaran kas. Berikut adalah pengujian arus kas atas saldo awal kas tahun 2010 yang bersaldo Rp 12.555.600,00.

$$\begin{aligned}\text{Saldo awal} &= \text{Saldo akhir tahun 2010} - \text{Penerimaan kas} + \\ \text{Pengeluaran kas} &= \text{Rp } 24.904.800,00 - \text{Rp } 641.160.500,00 + \text{Rp } \\ 628.811.300,00 &= \text{Rp } 12.555.600,00\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas telah membuktikan bahwa saldo awal tahun 2010 di buku kas telah sesuai dan saldo akhir kas tahun 2010 dapat diposting ke kertas kerja dalam akun kas. Saldo kas pada akhir tahun 2010 adalah sebesar Rp 24.904.800,00.

b. Bank

Saldo bank diperoleh dari buku tabungan perusahaan tahun 2010. Rekening pada buku tabungan ini menggunakan nama salah satu pemilik dan dipisahkan dari rekening pribadi pemilik tersebut. Rekening bank ini digunakan untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang dagangan kepada supplier. Dari buku bank perusahaan diketahui bahwa saldo buku bank pada akhir tahun 2010 adalah sebesar Rp 87.523.765,00.

c. Persediaan

Persediaan diperoleh dari kartu persediaan perusahaan tahun 2010. Perusahaan telah melakukan pencatatan atas jumlah persediaannya, barang masuk maupun barang keluar telah dicatat setiap harinya. Dari kartu persediaan perusahaan dapat dilihat bahwa saldo akhir persediaan tahun 2010 adalah sebesar Rp 16.283.650,00.



d. Kendaraan

Diperoleh dari daftar aktiva tetap yang diperoleh dari perusahaan. Saldo kendaraan merupakan harga perolehan kendaraan tersebut. Dari daftar aktiva tetap perusahaan dapat dilihat bahwa harga perolehannya adalah Rp 19.200.000,00 sehingga harga tersebutlah yang dimasukkan ke dalam saldo akun kendaraan.

e. Akumulasi penyusutan kendaraan

Merupakan beban penyusutan kendaraan dari tahun awal perolehan hingga akhir tahun 2010. Perhitungan penyusutan kendaraan diperoleh dengan menggunakan metode garis lurus yang menggunakan penggolongan pajak sebagai dasar penentuan tarif penyusutan.

f. Peralatan

Diperoleh dari daftar aktiva tetap yang diperoleh dari perusahaan. Saldo peralatan merupakan seluruh penjumlahan harga perolehan setiap aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, kecuali kendaraan. Aktiva perusahaan dibeli dengan menggunakan kas milik perusahaan.

g. Akumulasi penyusutan peralatan

Merupakan penjumlahan beban penyusutan dari tahun awal perolehan hingga akhir tahun 2010. Perhitungan penyusutan kendaraan diperoleh dengan menggunakan metode garis lurus yang menggunakan penggolongan pajak sebagai dasar penentuan tarif penyusutan. Metode garis lurus dipilih dengan alasan untuk memudahkan pemilik dalam menghitung penyusutan di tahun-tahun berikutnya. Berikut adalah perhitungan penyusutan dari aktiva-aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.



Tabel 4.8
Daftar Aktiva Tetap Perusahaan

KELOMPOK JENIS HARTA	WAKTU / TAHUN PEROLEHAN	PEROLEHAN (Rp)	EKONOMIS (Tahun)	TABIE PENYUSUTAN
I. BUKAN BANGUNAN				
Kelompok 1				
Lemari	1-Oct-07	6,000,000	4	50%
Meja	1-Oct-07	1,000,000	4	50%
Kursi	1-Oct-07	300,000	4	50%
Komputer	1-Oct-07	3,000,000	4	50%
Printer	1-Oct-07	600,000	4	50%
TV 14 inch	1-Oct-07	850,000	4	50%
Rak	1-Oct-07	3,500,000	4	50%
Kelompok 2				
AC	1-Oct-07	1,800,000	8	25%
Motor roda 3	10-Aug-08	19,200,000	8	25%

Tabel 4.9
Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap
(Metode Saldo Menurun)

1. Lemari

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-			6,000,000
2008	750,000	750,000	5,250,000
2009	2,625,000	3,375,000	2,625,000
2010	1,312,500	4,687,500	1,312,500

2. Meja

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-			1,000,000
2008	125,000	125,000	875,000
2009	437,500	562,500	437,500
2010	218,750	781,250	218,750



3. Kursi

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-			300,000
2008	37,500	37,500	262,500
2009	131,250	168,750	131,250
2010	65,625	234,375	65,625

4. Komputer

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-			3,000,000
2008	375,000	375,000	2,625,000
2009	1,312,500	1,687,500	1,312,500
2010	656,250	2,343,750	656,250

5. Printer

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-			600,000
2008	75,000	75,000	525,000
2009	262,500	337,500	262,500
2010	131,250	468,750	131,250

6. TV 12 inch

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-			850,000
2008	106,250	106,250	743,750
2009	371,875	478,125	371,875
2010	185,938	664,063	185,938

7. Rak

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-			3,500,000
2008	437,500	437,500	3,062,500
2009	1,531,250	1,968,750	1,531,250
2010	765,625	2,734,375	765,625

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-			1,800,000
2008	112,500	112,500	1,687,500
2009	421,875	534,375	1,265,625
2010	316,406	850,781	949,219

9. Motor Roda 3

Tahun	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-			19,200,000
2008	2,000,000	2,000,000	17,200,000
2009	4,300,000	6,300,000	12,900,000
2010	3,225,000	9,525,000	9,675,000

h. Utang dagang

Diperoleh dari jurnal pembelian yang memuat jumlah pembelian kredit dan tanggal pelunasannya. Saldo utang dagang ini diperoleh dari nota transaksi pembelian bulan Desember 2010 yang masi belum dilunasi oleh perusahaan. Saldo utang dagang pada akhir tahun 2010 adalah sebesar Rp 55.268.300,00. Angka saldo utang dagang pada akhir tahun 2010 dapat dilihat pada lampiran 4.

i. Ekuitas

Diperoleh dari tanya jawab dengan ketiga pemilik. Dari tanya jawab tersebut diperoleh keterangan bahwa ketiga pemilik sama-sama mengeluarkan modal yang sama yaitu Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Modal ini disetor pada tahun 2007.





j. Penjualan

Pada perusahaan ini, penjualan hanya dilakukan secara tunai. Saldo penjualan tunai diperoleh dari jurnal penerimaan kas. Diketahui saldo penjualan pada akhir tahun 2010 adalah sebesar Rp 598.160.500,00.

k. Harga pokok penjualan

Diperoleh dengan melihat kartu persediaan. Saldo harga pokok penjualan pada akhir tahun 2010 adalah sebesar Rp 418.712.350,00.

l. Beban-beban

Diperoleh dari jurnal pengeluaran kas yang mencatat seluruh kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar beban-beban yang timbul selama tahun 2010.

2. Jurnal penyesuaian

Berikut adalah jurnal-jurnal penyesuaian yang ada di perusahaan:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a. Beban penyusutan kendaraan | Rp 3.225.000,00 |
| Akumulasi penyusutan kendaraan | Rp 3.225.000,00 |
| (Diambil dari tabel 4.9) | |
| b. Beban penyusutan peralatan | Rp 3.652.344,00 |
| Akumulasi penyusutan peralatan | Rp 3.652.344,00 |
| (Diambil dari tabel 4.9) | |
| c. Beban pajak penghasilan | Rp 15.436.125,00 |
| PPH terutang | Rp 14.167.825,00 |
| PPH 25 | Rp 1.268.300,00 |



3. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi perusahaan menggunakan bentuk *multiple step*.

Berikut adalah laporan laba rugi UD. Mitra Abadi Sejahtera untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010.

Tabel 4.10
Laporan Laba Rugi Komersial

UD. MITRA ABADI SEJAHTERA LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode yg Berakhir 31 Desember 2010		
	(Rp)	(Rp)
Penjualan		598,160,500
Harga Pokok Penjualan :		
- Persediaan Awal	12,536,000	
- Pembelian	422,460,000	
- Persediaan Akhir	(16,283,650)	
Total HPP		(418,712,350)
Laba Kotor		179,448,150
Beban Operasional :		
- Beban Gaji	30,000,000	
- Beban THR	2,500,000	
- Beban Bensin	2,800,000	
- Beban Air Minum	704,000	
- Beban ATK	247,000	
- Beban Service Motor	1,014,200	
- Beban Listrik	3,751,700	
- Beban PDAM	861,600	
- Beban Telpo	5,282,800	
- Beban Iuran Ruko	1,800,000	
- Beban Administrasi	120,000	
- Beban lain-lain	369,000	
- Beban penyusutan kendaraan	3,225,000	
- Beban penyusutan peralatan	3,652,344	
Total Beban Operasional		(56,327,644)
Laba Usaha		123,120,506
Pendapatan Bunga Bank	557,909	
Pajak Bunga Bank	(111,582)	
Laba Bersih Sebelum Pajak		123,566,833
Pajak Penghasilan		15,436,125
Laba Bersih Setelah Pajak		108,130,708

Laporan Perubahan Ekuitas

UD. MITRA ABADI SEJAHTERA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 31 Desember 2010			
	Michael (Rp)	Franklin (Rp)	Herman (Rp)
Modal awal	8,000,000	8,000,000	8,000,000
Laba rugi tahun sebelumnya	5,956,079	5,956,079	5,956,079
Laba bersih	36,043,569	36,043,569	36,043,569
Prive	(26,000,000)	(26,000,000)	(26,000,000)
Modal akhir	23,999,649	23,999,649	23,999,649

Selama ini UD. Mitra Abadi Sejahtera belum pernah membuat laporan keuangan untuk kegiatan operasional perusahaan dan oleh karena keterbatasannya data untuk tahun 2007, 2008, dan 2009 maka tidak dapat diketahui laba atau rugi yang sebenarnya pada tahun-tahun tersebut.

Jumlah laba atau rugi tahun sebelumnya yang terdapat pada laporan perubahan modal di atas diperoleh dari selisih aktiva dan kewajiban serta modal pada tahun sebelumnya.



Neraca

UD. MITRA ABADI SEJAHTERA NERACA

per 31 Desember 2010

AKTIVA (Rp)

Aktiva Lancar

Kas	24,667,500
Bank	86,523,765
Piutang Dagang	-
Persediaan	16,283,650

Jumlah Aktiva Lancar 127,474,915

Aktiva Tetap

Kendaraan	19,200,000
Ak. Penyusutan Kendaraan	(9,525,000)
Peralatan	17,050,000
Ak. Penyusutan Peralatan	(12,764,844)

Jumlah Aktiva 13,960,156

Total Aktiva 141,435,071

Kewajiban Lancar

Utang Dagang	55,268,300
Utang Pajak Penghasilan	14,167,825

Jumlah Kewajiban Lancar 69,436,125

Ekuitas

Modal	24,000,000
Laba Ditahan Tahun Sebelumnya	17,868,238
Laba Ditahan Tahun Ini	108,130,708
Prive	(78,000,000)

Jumlah 71,998,946

Total Kewajiban dan Ekuitas 141,435,071



Laporan Laba Rugi Perpajakan

UD. MITRA ABADI SEJAHTERA LAPORAN LABA RUGI Untuk Periode yg Berakhir 31 Desember 2010		
	(Rp)	(Rp)
Penjualan		598,160,500
Harga Pokok Penjualan :		
- Persediaan Awal	12,536,000	
- Pembelian	422,460,000	
- Persediaan Akhir	(16,283,650)	
Total HPP		(418,712,350)
Laba Kotor		179,448,150
Beban Operasional :		
- Beban Gaji	30,000,000	
- Beban THR	2,500,000	
- Beban Bensin	2,800,000	
- Beban Air Minum	704,000	
- Beban ATK	247,000	
- Beban Service Motor	1,014,200	
- Beban Listrik	3,751,700	
- Beban PDAM	861,600	
- Beban Telpon	5,282,800	
- Beban Iuran Ruko	1,800,000	
- Beban Administrasi	120,000	
- Beban penyusutan kendaraan	3,225,000	
- Beban penyusutan peralatan	3,652,344	
Total Beban Operasional		(55,958,644)
Laba Usaha		123,489,506
Laba Bersih Sebelum Pajak		123,489,506
Pajak Penghasilan		15,436,125
Laba Bersih Setelah Pajak		108,053,381



Perhitungan PPh Badan

UD. MITRA ABADI SEJAHTERA	
Perhitungan PPh Badan	
Penghasilan netto fiskal	123,489,506
Penghasilan Kena Pajak	123,489,000
PPh terutang (50% X 25%)	15,436,125
Angsuran PPh 25	1,268,300
PPh 29 Ymh Dibayar	14,167,825





BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. UD. Mitra Abadi Sejahtera selama ini belum melakukan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. UD. Mitra Abadi Sejahtera tidak pernah membuat laporan keuangan sehingga pemilik tidak pernah mengetahui labanya serta nilai asetnya secara pasti.
2. UD. Mitra Abadi Sejahtera selama ini menggunakan norma perhitungan untuk menghitung kewajiban perpajakannya sehingga nilai pajak yang dibayarkan cenderung tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dikarenakan perhitungannya juga menggunakan penafsiran pemiliknya.
3. Diketahui dari koreksi fiskal yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa UD. Mitra Abadi Sejahtera mengalami kurang bayar untuk pajak penghasilannya pada tahun 2010.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya UD. Mitra Abadi Sejahtera melakukan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku serta membuat laporan keuangan sehingga pemilik dapat mengetahui labanya serta nilai aetnya secara pasti.

2. Sebaiknya UD. Mitra Abadi Sejahtera menggunakan pembukuan untuk menghitung kewajiban perpajakannya sehingga nilai pajak yang dibayarkan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
3. Sebaiknya UD. Mitra Abadi Sejahtera membayar kekurangan pajak penghasilannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Hery. 2009. *Akuntansi Keuangan Menengah I*. Jakarta:Bumi Aksara.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi>. Tanggal 07-April-2012. Jam 19:00.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha. Tanggal 25-Februari-2012. Jam 21:23.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha. Tanggal 07-April-2012, Jam 19.05.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan. Tanggal 29 Februari 2012. Jam 22:25.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif. Tanggal 23 April 2012. Jam 13:30.
- Hutagaol, John. 2004. Perlakuan Beda Akuntansi Komersial dan Pajak Penghasilan Sesuai PSAK 46. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. STIE PERBANAS. Vol.3. No.11 Juni (6-10).
- Hutagaol, John. 2003. Sekilas tentang Prinsip dan Konsep dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. STIE PERBANAS. Vol.2. No.8 Maret (24-28).
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta:Salemba Empat.
- Kieso, D.A., Weygandt, J.J., Warfield, T.D. 2007. *Intermediate Accounting*. (12th ed). Asia:John Wiley Sons.
- Kuanda, Meilyana. 2010. *Perlakuan Akuntansi dan Perhitungan Pajak Penghasilan Toko X*. Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Mursyidi. 2010. *Akuntansi Dasar*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Radianto, Wirawan, ED. 2010. *Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Simangunsong, A dan Sari, E. 2004. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta:Grasindo.
- Soemarso. 2002. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta:Salemba Empat.
- Sugiri, Slamet dan Riyono, Bogat, Agus. 2007. *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta:STIM YKPN.





Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sulistiawan, Dedhy dan Feliana, Yie, Ke. 2006. *Akuntansi Keuangan Menengah I*. Malang:Bayumedia.

Supramono dan Damayanti, Theresia, Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta:Andi.